

**PENINGKATAN FENOMENA XENOFOBIA: STUDI KASUS ETNIS
KOREA DI JEPANG (2012-2015)**

SKRIPSI



الجامعة الإسلامية
الاندونيسية

Oleh:

FIRYAL ALYA KUSUMA DEWI

15323117

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA**

UNIVERSITASI ISLAM INDONESIA

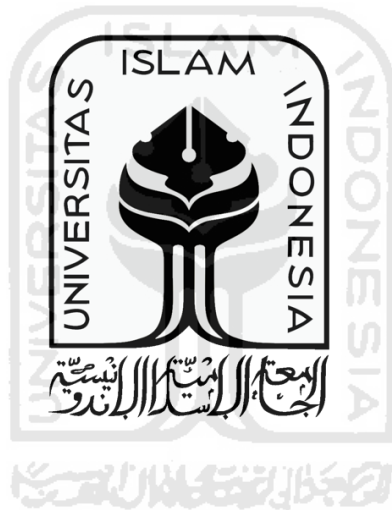
YOGYAKARTA

2020

**PENINGKATAN FENOMENA XENOFobia: STUDI KASUS ETNIS
KOREA DI JEPANG (2012-2015)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat Guna Memperoleh
Derajat Sarjana Strata 1 Hubungan Internasional



Oleh:

FIRYAL ALYA KUSUMA DEWI

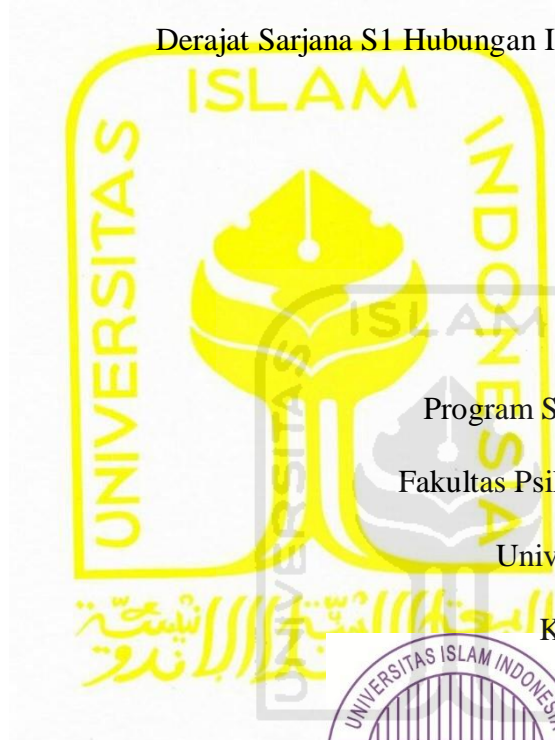
15323117

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITASI ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2020

**PENINGKATAN FENOMENA XENOFobia: STUDI KASUS ETNIS
KOREA DI JEPANG (2012-2015)**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-syarat Guna Memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A.

Dewan Penguji

1. Geradi Yudhistira, S.Sos., M.A.
2. Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int, M.A.
3. Karina Utami Dewi, S.IP., M.A.

Tanda Tangan

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Firyal Alya Kusuma Dewi
No. Mahasiswa : 15323117
Program Studi : Hubungan Internasional
Judul Skripsi : Peningkatan Fenomena Xenofobia:
Studi Kasus Etnis Korea di Jepang (2012-2015)

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa:

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan laporan penelitian skripsi, saya tidak melakukan tindakan pelanggaran etika akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia. Oleh karena itu, skripsi yang saya buat merupakan karya ilmiah saya sebagai peneliti, bukan jiplakan atau karya orang lain.
2. Apabila dalam ujian skripsi saya terbukti melanggar etika akademik, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana aturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.
3. Apabila di kemudian hari setelah saya lulus dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 26 Agustus 2020

Yang menyatakan



Firyal Alya Kusuma Dewi

HALAMAN PERSEMBAHAN



Alhamdulillahirabbil'alamin

Pertama-tama, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala karunia yang Engkau berikan. Terima kasih atas kesempatan, kemudahan serta kelancaran sehingga dapat menyelesaikan program studi strata satu ini hingga selesai. Kedua, Shalawat serta salam selalu panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Saya persembahkan karya sederhana ini untuk kedua orang tua yang telah menyayangi dan mengasihi saya selama ini, yaitu:

Ilham Perdana Kusuma, S.H

Dewi Najah Radin, S.H

Terima kasih Mama dan Papa atas segala dukungan, doa cinta, kasih sayang serta doa dan nasihat yang tiada hentinya mengalir kepada anak-anaknya. Terimakasih untuk segala doa, nasehat, dukungan, cinta dan kasih sayang yang terus mengalir seperti air dan tiada ujungnya. Semoga Titi akan selalu bisa memberikan kebahagiaan dan kebanggaan kepada Mama dan Papa. Semoga Allah SWT selalu memberikan umur, kesehatan dan rezeki yang panjang kepada Mama Papa agar Titi masih mempunyai banyak waktu untuk membahagiakan Mama Papa kedepannya. Semoga dengan selesainya studi ini, menjadi sebuah awal dari kehidupan Siti untuk menjadi orang yang berhasil, sukses serta bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Aamiin Allahumma Aamiin.

HALAMAN MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.”

—QS Al-Insyirah 6-7

“Do the best you can, with what you can, while you can, and success is inevitable.”

—Steve Maraboli

"It's not about how hard you can hit; it's about how hard you can get hit and keep moving forward."

—Rocky Balboa

"Plant your garden and decorate your own soul, instead of waiting for someone to bring you flowers."

—Jose Luis Borges

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah memberikan rahmat, pertolongan, kelancaran serta kemudahan dalam mengerjakan skripsi ini yang dapat selesai tepat pada waktunya. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis menyadari bahwa proses dalam penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari motivasi, dukungan, nasehat, bimbingan serta saran dari semua pihak. Oleh karena itu, di sini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Ilham Perdana Kusuma, S.H dan Ibu Dewi Najah Radin, S.H. Terimakasih untuk semua dukungan, doa dan motivasi kesabarannya untuk mendidik penulis hingga saat ini. Semoga Papa dan Mama selalu sehat, panjang umur, dan bisa melihat penulis bisa menjadi lebih dari sekarang suatu hari nanti.
2. Kedua adik penulis, Firkhansya Zuhaira Kusuma Dewi dan Firnanda Syalsyabila Kusuma Dewi, semoga kalian berdua selalu diberikan kemudahan oleh Allah SWT dalam setiap urusan.
3. Bapak Dr. H. Fuad Nashori, S.Psi., M.Si., Psikolog selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A. selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Geradi Yudhistira, S.Sos., M.A., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan nasehat, motivasi, smasukan, serta bersedia

membagi waktunya dalam membimbing penulis untuk terus berusaha menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.

6. Bapak Enggar Furi Herdianto, S.IP., M.A., selaku dosen pembimbing akademik selama mengenyam pendidikan di Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
7. Segenap dosen Prodi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan pengalaman, ilmu, arahan serta motivasi hidup kepada penulis dan mengajarkan banyak ilmu dan pengetahuan. Mohon maaf apabila selama masa perkuliahan telah banyak berbuat kesalahan. Semoga selalu diberikan kesuksesan, kesehatan, umur panjang serta kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan.
8. Mba Mardiatul Khasanah, selaku staff di program studi Hubungan Internasional yang telah banyak membantu dan selalu sabar dalam menjawab pertanyaan penulis yang berkaitan dengan permasalahan akademik. Semoga Allah melancarkan yang menjadi niat baik Mbak Diah.
9. Teruntuk sahabatku selama perkuliahan Fenni, Fuji dan Mutia, Terimakasih selalu mewarnai hari-hari di kampus. Kalian selalu memberikan canda dan tawa serta gosip-gosip hot news di kampus dan kalian juga menjadi salah satu penyemangat dalam menyelesaikan skripsi. Semoga kita berempat selalu bersahabat baik hingga tua nanti.
10. Laskar Pelangi, sahabatku sedari sekolah dasar yang selalu bersedia menampung cerita-cerita penulis dan memberikan motivasi serta semangat untuk penulis selama ini. Terima kasih karena masih menjaga pertemanan ini dan semoga Allah selalu menjaga persahabatan kita.

11. Yolla Dwita Sari, teman gabutku, terima kasih telah menjadi sahabat yang baik dan selalu memberikan saran, masukan dan motivasi yang baik untuk penulis. Walaupun kita jauh tapi semoga tidak akan pernah putus komunikasi dan tetap menjadi sahabat baik saya. Sukses dan bahagia untuk kedepannya.
12. Anna Rachmawati, teman senasib sepenanggungan dalam menyelesaikan skripsi. Terima kasih telah sama-sama berjuang dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih karena telah menjadi teman cerita penulis untuk berbagi kesenangan dan keresahan yang penulis rasakan. Semoga Allah selalu mempermudah segala urusan kita.
13. KKN unit 379, terima kasih telah memberikan warna baru selama kehidupan kkn. Terima kasih telah menjadi tim dan partner terbaik. Semoga kita tidak putus silaturahmi dan sukses untuk kalian semua.
14. Teman-teman HI UII angkatan 2015 yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih telah mewarnai kehidupan perkuliahan dan telah berjuang bersama selama ini. Salam sukses untuk teman-teman HI UII 2015.

Sekali lagi, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beberapa pihak yang telah disebutkan maupun yang tidak disebutkan, karena telah memberikan banyak kontribusi dalam pengerjaan dan penyelesaian skripsi ini dengan sebaik mungkin. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat memberikan inspirasi bagi pembaca untuk menyusun penelitian yang terbaru dan inovatif.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Firyal Alya Kusuma Dewi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GRAFIK.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
ABSTRAK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Signifikasi Penelitian.....	6
1.5 Cakupan Penelitian.....	6
1.6 Tinjauan Pustaka	7
1.7 Landasan Konseptual	10
1.8 Metode Penelitian.....	15
1.8.1 Jenis Penelitian.....	15
1.8.2 Subjek Penelitian.....	15
1.8.3 Alat Pengumpul Data.....	15
1.8.4 Proses Penelitian.....	16
BAB II PERKEMBANGAN FENOMENA XENOFOBIA DI JEPANG.....	17
2.1 Sejarah Masuknya Xenofobia terhadap Etnis Korea ke Jepang	17
2.2 Perkembangan Xenofobia di Jepang Melalui “Doudou Diene Report”	20
2.2.1 Masyarakat Keturunan Bekas Koloni (Zainichi)	21
2.2.2 Imigran Asing.....	24

2.3 Fakta Meningkatnya Perilaku Xenofobia di Jepang (2012-2015)	26
2.4 Kebijakan Pemerintah Jepang dalam Meredam Peningkatan Xenofobia di Jepang	38
BAB III FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PENINGKATAN XENOFobia DI JEPANG	43
3.1 Ancaman Realistik	45
3.2 Ancaman Simbolik	55
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	66
4.1 Kesimpulan	66
4.2 Saran dan Rekomendasi	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Grafik penduduk asing di Jepang yang pernah menjadi target diskriminasi 2013-2017 (Mainichi, 2017).....	27
Grafik 2. Grafik peningkatan tindakan xenofobia (hate speech) dari tahun ke tahun (Mainichi, 2016)	29
Grafik 3. Grafik alasan penduduk asing tidak dapat membeli perumahan di Jepang (Osumi, 2017).....	35



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Bentuk ancaman realistik oleh Kendall (Kendall, 1998, p. 84). 46
- Gambar 2. Sikap masyarakat asli terhadap pekerja asing 49



DAFTAR TABEL

Tabel 1: Ringkasan deskripsi ancaman realistik dan ancaman simbolik 64



DAFTAR SINGKATAN

UNHCR	: United Nations High Commissioner for Human Rights
CERD	: Committee on the Elimination of Racial Discrimination
ICERD	: International Committee on the Elimination of Racial Discrimination
UN	: United Nations
ITT	: Integrated Threat Theory



ABSTRAK

Aksi xenofobia terhadap etnis Korea mengalami peningkatan di Jepang. Peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2012 hingga tahun 2015 yang sebagai besar dilakukan oleh grup ekstremis sayap kanan yang bernama Zaitokukai. Pemerintah Jepang juga turut mengupayakan kebijakan dalam meredam aksi xenofobia yang terjadi di kalangan masyarakat. Namun, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah cenderung terlambat karena kegagalan pemerintah Jepang mengambil langkah-langkah efektif untuk mencegah diskriminasi rasial. Faktor-faktor mengenai alasan peningkatan xenofobia terhadap etnis Korea di Jepang akan dijabarkan melalui Integrated Threat Theory yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu ancaman realistik dan ancaman simbolik.

Kata Kunci: Jepang, Hate Speech, Peningkatan Xenofobia, Integrated Threat Theory, Zaitokukai, Zainichi, Etnis Korea

ABSTRACT

Xenophobic attitudes against ethnic Koreans have increased in Japan. A significant increase from 2012 to 2015 was largely carried out by the right-wing extremist group called Zaitokukai. The Japanese government also pursues policies in xenophobic attitudes that occur in society. However, the policies carried out by the government tended to be late because the failure of the Japanese government to take effective steps to prevent nationalization. The factors that increase the factor of increasing xenophobia towards ethnic Koreans in Japan will be described through the Integrated Threat Theory which is divided into two parts, namely realistic threats and symbolic threats.

Keywords: Japan, Hate Speech, Increased Xenophobia, Integrated Threat Theory, Zaitokukai, Zainichi, Korean Ethnicity

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena xenofobia bukanlah suatu isu baru di Jepang. Xenofobia menjadi sebuah fenomena yang sering diperbincangkan dalam lingkup studi Hubungan Internasional, terlebih tentang peningkatan aksi kebencian terhadap etnis minoritas di Jepang (Pollmann, 2015). Xenofobia memiliki arti perasaan khawatir, benci atau prasangka negatif yang berlebihan terhadap orang asing yang berasal dari negara yang berbeda. Bentuk dari perilaku xenofobia berupa perilaku diskriminatif, kekerasan serta menebarkan ujaran kebencian (Mogekwu, 2005, p. 7). Masyarakat yang memiliki sentimen xenofobia cenderung menganggap bahwa orang asing akan mempengaruhi kebudayaan asli Jepang, atau bahkan dapat menggantikan kebudayaan asli mereka sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi identitas nasional mereka (Burgess J. , 1986).

Kata xenofobia di kalangan masyarakat Jepang bukan lagi hal asing untuk didengar. Pada tahun 2016, Xenofobia terpilih sebagai word of the year sebagai isu yang menjadi sorotan dunia. Perilaku xenofobia menunjukkan bentuk penolakan akan hadirnya orang asing sebagai bagian dari warga negara. (Sanchez-Mazas & Licata, 2015, p. 802). Masalah meningkatnya tindakan rasisme terhadap etnis non Jepang cukup populer di Jepang, terutama terhadap etnis Korea, dianggap sebagai bagian dari bentuk fenomena xenofobia (Park S. , 2017, p. 66). Xenofobia mencakup bermacam bentuk dan aksi di dalamnya, sehingga menjadi salah satu isu dalam lingkup Hubungan Internasional yang cukup menarik untuk dibahas.

Salah satu bentuk perilaku xenofobia di Jepang adalah hate speech, aksi ini merupakan tindakan kebencian yang paling populer di Jepang. Bahkan istilah hate speech telah terpilih sebagai Top Ten National Buzzword pada tahun 2013 (Higashikawa, 2017, p. 2). Sebenarnya tidak ada standar definisi dari hate speech, namun istilah hate speech biasanya digunakan ketika melakukan suatu tindakan yang mengekspresikan kebencian, seperti meneriakkan kata-kata buruk terhadap suatu kelompok ras, etnis atau identitas tertentu untuk menyuarakan rasa frustrasi dari kelompok tersebut (George, 2014, p. 1). Hate speech terjadi secara langsung maupun tidak langsung (cyberhate) (Brown, 2017, p. 2).

United Nations High Commissioner for Human Rights (UNHCR) mengutus Doudou Diene untuk mengunjungi Jepang dengan tujuan untuk melakukan penelitian mengenai aktivitas diskriminasi yang terjadi di Jepang pada bulan Juli tahun 2005. Secara garis besar, Diene mengungkapkan bahwa fenomena xenofobia memang sungguh-sungguh terjadi di Jepang. Terdapat tiga level bentuk diskriminasi di Jepang, yaitu terhadap etnis minoritas nasional, masyarakat keturunan bekas koloni serta imigran asing yang menetap di Jepang (UNHCR, 2006). Pada penelitian ini, secara khusus akan membahas fenomena xenofobia yang ada di Jepang terhadap etnis Korea yang berada di Jepang, baik yang masyarakat keturunan Korea (Zainichi) maupun pendatang baru atau imigran yang berasal dari Korea Selatan.

Zainichi adalah keturunan Korea yang tinggal di Jepang. Dalam sistem registrasi penduduk asing Jepang, Zainichi terdaftar sebagai dua kategori, yaitu Korea Utara (Chosen) dan Korea Selatan (Kankoku). Zainichi merupakan hasil dari kolonisasi Jepang terhadap Semenanjung Korea mulai tahun 1910 hingga

berakhirnya perang dunia ke 2 tahun 1945 (Yamada & Yusa, 2014). Sejarah Jepang yang selama ini bergelut dengan berbagai tekanan asing telah meninggalkan jejak xenofobia yang tidak dapat hilang hanya dalam jangka waktu puluhan tahun saja. Baik masyarakat keturunan maupun imigran di Jepang sering kali mengalami diskriminasi terhadap jaminan fasilitas-fasilitas kesejahteraan dalam masyarakat, seperti pendidikan, kesempatan kerja, kesehatan, tempat tinggal hingga perlindungan hukum.

Selama tahun 2012 hingga tahun 2015, aksi xenofobia mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hate speech menjadi salah satu bentuk perilaku xenofobia yang menjadi sorotan di Jepang karena kasusnya hampir selalu ada setiap tahunnya (Yamaguchi, 2013, p. 102). Hate speech yang terjadi terhadap masyarakat asing, khususnya terhadap etnis Korea telah menjadi masalah yang cukup serius di Jepang. Bahkan mulai banyak bermunculan komunitas-komunitas seperti kelompok ekstremis sayap kanan yang sengaja dibentuk untuk melancarkan aksi-aksi tersebut. Permusuhan antar etnis, diskriminasi, intimidasi langsung terhadap etnis minoritas semakin sering ditemukan.

Zaitokukai merupakan kelompok ekstremis sayap kanan terbesar di antara organisasi konservatif dan sayap kanan lainnya di Jepang. Tujuan didirikannya kelompok ini adalah menentang privilege atau hak-hak istimewa yang dimiliki oleh etnis Korea di Jepang. Aksi kebencian di Jepang paling banyak dilakukan oleh kelompok ekstremis sayap kanan tersebut. Kelompok ini dianggap sebagai organisasi representatif dari sebagian kecil kelompok sayap kanan yang menyebut diri mereka action-conservative (kodosuru hoshu) (Shibuichi, 2015, p. 730). Taktik

serangan yang dilakukan oleh Zaitokukai memang tidak melukai secara fisik, namun menyebabkan gangguan secara psikologis dimana hadirnya kelompok tersebut menimbulkan ancaman bagi masyarakat.

Tindakan kebencian sering kali menyerang tempat dimana banyak orang-orang Korea, seperti Korea Town (kampung Korea) dan Korean Minority School (sekolah minoritas Korea) (Presse, 2013). Hingga saat ini, sangat susah untuk mengidentifikasi berapa banyak Zainichi Korea yang tinggal di Jepang, karena situs statistik demografi resmi di Jepang tidak memiliki kategori untuk ras dan etnis. Menurut statistik, pada akhir tahun 2011, lebih dari 545.000 orang asing yang terdaftar sebagai etnis Korea (Itagaki, 2015, p. 51).

Tindakan xenofobia lebih didasarkan pada struktur geopolitik Asia Timur. Penyebab dari meningkatnya aksi hate speech pada tahun 2012 diduga karena memburuknya hubungan Jepang dengan Korea Selatan karena sengketa Pulau Dokdo. Peningkatan ini secara signifikan diduga setelah Presiden Korea Selatan, Lee Myung-Bak melakukan kunjungan ke Dokdo (Takeshima) pada Agustus 2012 tanpa melakukan perizinan terlebih dahulu kepada pemerintah Jepang (Deutsche Welle, 2013).

Selain meningkatnya aksi hate speech yang dilakukan oleh grup ekstremis sayap kanan, masyarakat asing, termasuk etnis Korea juga menerima tindakan xenofobia lain, seperti housing discrimination, bentuk diskriminasi yang diterima seperti ejekan rasisme dan tulisan 'no foreigners', hingga penolakan aplikasi sewa sehingga masyarakat asing bukan asli Jepang tidak diperkenankan untuk membeli maupun menyewa rumah (Real Estate Japan, 2017).

Ketika hate speech merajalela, pemerintah Jepang belum memberlakukan hukum mengenai anti-diskriminasi maupun pelarangan serangan ujaran kebencian terhadap etnis Korea. Tidak ada perundang-undangan yang mengatur mengenai kebencian rasial, maka tindakan kebencian sejauh ini dianggap legal karena dianggap sebagai bagian dari demokrasi, yaitu freedom of speech. Setiap kali terjadi aksi kebencian, ahli hukum yang mendukung ideologi negatif tersebut hanya menganggap bahwa hal tersebut adalah bagian dari kebebasan berpendapat dan dapat dikatakan legal karena belum ada hukum yang mengatur secara resmi (Alix, 2016, p. 8).

Pemerintah Jepang baru mulai memberlakukan kebijakan anti diskriminasi setelah mendapatkan tekanan dari internasional. Pemerintah cenderung terlambat dalam mengatasi sentimen xenofobia. Karena salah satu alasan terjadinya peningkatan tindakan xenofobia terhadap etnis Korea di Jepang adalah gagalnya pemerintah Jepang mengambil langkah-langkah efektif untuk mencegah aksi kebencian terhadap penduduk Korea di Jepang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya peningkatan xenofobia di Jepang. Maka, permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah **“Mengapa Terjadi Peningkatan Fenomena Xenofobia di Jepang Pada Tahun 2012-2015?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui terjadinya peningkatan fenomena xenofobia di Jepang pada tahun 2012-2015
2. Mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya fenomena xenofobia di Jepang

1.4 Signifikasi Penelitian

Penelitian ini akan meneliti tentang bagaimana situasi sosial masyarakat di Jepang sehingga terjadi peningkatan sentimen xenofobia sebagai faktor pendorong dari peningkatan aksi xenofobia di Jepang. Upaya pemerintah untuk menekan angka sentimen xenofobia cenderung terlambat, karena pemerintah gagal menyusun langkah-langkah efektif untuk mencegah aksi kebencian di Jepang. Sehingga peneliti akan menggunakan alternatif Integrated Threat Theory dalam mengidentifikasi faktor-faktor terjadinya tindakan xenofobia di Jepang.

1.5 Cakupan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam studi politik dan pemerintahan Jepang serta situasi sosial masyarakat Jepang tahun 2012-2015. Penelitian ini berfokus pada keadaan sosial domestik Jepang ketika terjadi tindakan xenofobia. Pembahasan pada penelitian ini akan dimulai pada tahun 2012 ketika aksi kebencian xenofobia terhadap penduduk Korea di Jepang semakin meningkat secara signifikan daripada tahun-tahun sebelumnya. Penelitian ini akan menjelaskan mengenai faktor-faktor mengapa aksi kebencian semakin bertambah setiap tahunnya. Upaya pemerintah dalam menghadapi peningkatan aksi kebencian juga akan dijabarkan. Selain itu, berbagai pemikiran yang melekat dalam masyarakat terhadap nilai pada diri mereka juga mengenai identitas masyarakat Jepang sebagai masyarakat yang homogen

menjadi sebuah pendukung bagi hadirnya sentimen xenofobia yang terjadi di Jepang.

1.6 Tinjauan Pustaka

Pada penelitian literatur mengenai sentimen xenofobia di Jepang, terdapat banyak macam buku dan jurnal yang dapat dijadikan pendukung referensi. Pada tulisan yang ditulis oleh Peter Hervik mengungkapkan bahwa berbagai protes yang terjadi di Eropa saat ini menjadi salah satu bentuk aksi xenofobia yang meningkat secara signifikan. Berbagai kelompok anti imigran menjadi sebuah cerminan terhadap serangan 11 September telah menjadi isu yang menjadi sorotan dunia. Bagi Hervik, tindakan yang dilakukan oleh media yang turut andil dalam menyebarkan sentimen tersebut, seperti isu penerbitan karikatur Muhammad di Denmark yang menjadi kontroversi pada tahun 2005. Selain itu, berbagai peristiwa teror tentang kelompok Islam yang telah mengakui sebagai dalang dari peristiwa tersebut juga menjadi momok peningkatan serangan-serangan xenofobia yang terjadi di Eropa. Selain itu, Hervik juga berpendapat peningkatan sentimen xenofobia juga disebabkan oleh Islamofobia. Xenofobia merupakan respon yang terlihat dari masyarakat terhadap peningkatan anti-imigran di Eropa yang merupakan wujud dari pemikiran satu budaya. (Hervik, 2015, pp. 796-806).

Pendapat lain juga dikemukakan oleh David Haekwon Kim dan Ronald R. Sundstrom. Keduanya berargumen bahwa xenofobia berbeda dengan nativisme dan rasisme. Rasisme menjadi salah satu penyebab munculnya sentimen xenofobia di Jepang di mana adanya peningkatan imigran mempengaruhi munculnya sentimen xenofobia di Jepang. Peningkatan jangka waktu pendidikan mengurangi terjadinya sentimen xenofobia secara signifikan pada angkatan kerja asli Jepang. Hasil ini

sejalan dengan temuan lain pada negara-negara barat. Kedua, hasil menunjukkan bahwa pengaruh pendidikan terhadap sikap terhadap orang asing bertindak melalui kontak dengan orang asing, bukan melalui self-interest ekonomi. Penemuan ini menunjukkan bahwa pendidikan tinggi memberikan lebih banyak peluang untuk bertemu dan berinteraksi terhadap orang asing. Namun dengan contact theory, keduanya mengungkapkan bahwa mengurangnya sikap xenofobia pada masyarakat adalah karena populasi imigran yang lebih besar. Kurangnya interaksi satu sama lain menjadi hal yang sangat mungkin untuk meningkatkan prasangka buruk terhadap orang asing (Kim & Sundstrom, 2014, pp. 25-31).

Kemudian, Rogers Brubaker menjabarkan tentang istilah xenofobia yang digunakan pertama kali dalam studi Hubungan Internasional. Istilah ini pertama kali muncul di Amerika Serikat dan mulai berkembang pada tahun 1880-an, ketika imigran yang berasal dari Eropa Timur mulai berdatangan. Kemudian sentimen xenofobia menyebar secara masif hingga ke Prancis yang sedang mengalami pemulihan setelah terjadinya resesi ekonomi. Pada saat itu, masyarakat Prancis mengalami peristiwa dilema, karena terbagi menjadi dua golongan, yaitu asimilasionis, sebagai masyarakat yang menerima dengan tangan terbuka hadirnya kebudayaan baru dari kedatangan imigran dan yang kedua ekslusionis, yaitu masyarakat yang bersikap menolak imigran dan cenderung tidak menerima kehadiran perbedaan etnis diantara mereka. Seiring dengan revolusi di Prancis, pemerintah Prancis semakin giat dalam usaha meningkatkan nasionalismenya, namun nasionalis sayap kanan pun turut ikut berkembang seiring terjadinya isu xenofobia. Dari masyarakat nasionalis yang berpikiran ekslusionis, kemudian

istilah counternasionalism muncul. Pemikiran tersebut semakin menguat hingga saat ini. (Brubaker, 1992, pp. 11-25).

Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan gerakan populis sayap kanan dan xenofobia telah terlihat jelas di seluruh Eropa, dan Jepang saat ini mengalami fenomena serupa. Karena memiliki kesamaan sebagai citra negara yang homogen, masyarakat Jepang telah menyaksikan kebangkitan sebuah gerakan sayap kanan etno-nasionalis yang mempercayai bahwa mitos tentang negara yang seharusnya merupakan negara yang homogen. Hadirnya xenofobia dimanfaatkan sebagai platform oleh politisi populis dan nasionalis dengan mengeksploitasi tren semacam itu untuk memperebutkan kekuasaan, serta mencari popularitas kebijakan pemerintah di mata rakyat dengan cara memberikan ruang untuk menyalurkan ide xenofobia dan ekstremis sayap kanan di dalam masyarakat demokratis. Berkembangnya gerakan xenofobia dan sayap kanan merupakan sebuah ancaman, baik bagi dewasa maupun muda karena secara langsung dan tidak langsung, akan menjadi calon korban dan pelaku yang potensial. Salah satu politisi populis yang memanfaatkan tren tersebut adalah politisi seperti Shintaro Ishihara, yang merupakan salah satu politisi nasionalis paling terkemuka di Jepang telah berulang kali membuat pernyataan xenofobik yang menargetkan orang-orang dari bekas Jepang Koloni Asia Timur. Singkatnya, sayap kanan di Jepang telah bergeser dari nasionalisme otoriter menjadi xenofobia-nasional-populis, yang mencerminkan politik nasional dan internasional. Sementara itu, Nakano menunjukkan pergeseran signifikan ke kanan dalam politik Jepang dalam beberapa tahun terakhir, khususnya selama periode pemerintahan Shinzo Abe pertama dan kedua (2006–2007, 2012 hingga sekarang) (Kitayama, 2018, pp. 251-254).

Pada tulisan yang di tulisan oleh Sara Park ini membahas mengenai semakin berkembangnya tindakan rasisme yang populer di Jepang terhadap etnis minoritas, khususnya etnis korea. Rasisme yang dimaksud disini biasa disebut dengan xenofobia. Sara berargumen bahwa akar dari tumbuhnya sentimen xenofobia adalah karena kolonial Jepang di masa lalu dimana immigration control system melabeli seluruh etnis minoritas Jepang sebagai foreign atau orang asing yang bukan merupakan bagian dari Jepang. Secara historis, foreign atau alien menjadi sebuah sebutan untuk mengecualikan etnis minoritas yang memiliki kewarganegaraan Jepang dalam jangka waktu panjang. Mengutip dari sarjana terkemuka yang membahas fenomena xenofobia di Jepang, Naoto Higuchi menjelaskan bahwa terbentuknya xenofobia berakar dari kerangka politik dari Asia Timur. Sentimen xenofobia merupakan bentuk sebuah hubungan dengan negara tetangga yang memiliki masa lalu kelam pada jaman kolonial dan saat terjadinya perang dingin. Immigration control regime menganggap rasisme sebagai bagian dari xenofobia dengan mengkategorikan etnis minoritas sebagai imigran asing mengenai out group menjadi salah satu alasan tingkat kontak yang rendah (Park, 2017, pp. 64-67).

1.7 Landasan Konseptual

Integrated Threat Theory

Sesuai dengan pokok permasalahan yang terjadi dalam menganalisis penelitian ini, penulis akan menggunakan perspektif Integrated Threat Theory (ITT) oleh Walter G. Stephan dan Cookie White Stephan sebagai landasan teori (Stephan & Stephan, 1996). ITT merupakan salah satu teori yang mampu menjelaskan sikap anti-imigran yang terjadi pada sebuah negara dan merupakan salah satu kerangka

teori paling efisien untuk mengidentifikasi pemicu terjadinya prasangka. ITT merupakan konsep yang menggabungkan antara teori psikologi dan sosiologi untuk menggambarkan suatu ancaman yang dirasakan oleh in group (masyarakat asli) yang mengarah kepada prasangka antara kelompok sosial. Menurut Stephan, persepsi akan perasaan takut atau terancam oleh kelompok lain dapat memicu adanya prasangka dan perilaku negatif yang dilakukan oleh in group terhadap hadirnya out group. (Stephan & Stephan, *Predicting Prejudice*, 1996, p. 417). Stephan menekankan bahwa ITT berkaitan dengan ancaman yang dirasakan dari pada yang sebenarnya. Ancaman yang dirasakan memiliki konsekuensi nyata, terlepas dari apakah persepsi ancaman itu akurat atau tidak. Teori ini juga berfokus pada kondisi yang mengarah pada persepsi ancaman yang berdampak pada sikap dan perilaku dalam kelompok (Makashvili, Vardanashvili, & Javakhishvili, 2018, p. 466).

Dalam versi asli Integrated Threat Theory, teori ini memiliki empat jenis ancaman, yaitu ancaman realistik, ancaman simbolik, stereotip negatif dan kecemasan antar kelompok. Namun dalam versi terbaru, jumlahnya telah dikurangi menjadi dua tipe dasar terjadinya prasangka, yaitu ancaman realistik dan simbolik. Pada awalnya, stereotip yang negatif dianggap sebagai jenis ancaman yang terpisah, namun dalam ITT versi terbaru stereotip negatif menjadi penyebab ancaman yang melibatkan karakteristik dari kelompok out group yang dapat menjadi dampak negatif bagi in group, seperti imoralitas, agresivitas, kelicikan, dan lain sebagainya. Ternyata, stereotip negatif menjadi salah satu indikator signifikan dari ancaman realistik dan ancaman simbolik. Pada penelitian ini akan menggunakan teori ITT

versi terbaru, hanya akan membahas dua jenis ancaman, yaitu ancaman realistik dan ancaman simbolik (Renfro & Lausanne, 2002, p. 191).

Dalam konteks Intergroup Threat Theory, minimnya interaksi satu sama lain membuat in group merasa out group sebagai sebuah ancaman. Ancaman antar kelompok terjadi ketika salah satu kelompok merasa khawatir apabila kehadiran kelompok lain dapat membahayakan kehidupan mereka. Kecemasan yang ditimbulkan oleh perasaan terancam ini mengarah pada kelompok anggota untuk tidak menyukai kelompok lain. Kurangnya pengetahuan atau ketidakingintahuan (knowledge) mengenai out group menjadi salah satu alasan tingkat interaksi yang rendah. Respon terhadap hadirnya orang asing adalah ketakutan bahwa out group mampu mengubah kebudayaan yang ada, menjadikan identitas nasional in group menjadi terancam. Menurut Stephan & Stephan, terdapat 2 tipe ancaman yang muncul dari prasangka in group terhadap out group. Kedua jenis ancaman ini dapat memicu munculnya prasangka.

1. Ancaman realistik (realistic threat)

Ancaman realistik terdiri dari kekhawatiran keberadaan out group akan mengancam in group. Ancaman ini memiliki konsekuensi nyata dan langsung. Ancaman terhadap ekonomi, kekuatan politik serta kesejahteraan menjadi pemicu adanya rasa bersaing dalam kelompok. In group yang melihat bahwa kelompok lain sebagai 'musuh' yang hanya ingin memanfaatkan sumber daya milik mereka. Stephan berasumsi bahwa konflik inter-group terjadi ketika adanya ancaman terhadap kekuatan politik dan ekonomi suatu kelompok (Stephan, Diaz-Loving, & Duran, 2000, p. 241). Ancaman ini dapat berbentuk fisik atau materi (tanah, suplai makanan maupun kebutuhan hidup lainnya

seperti air) dan psikologikal (status sosial, kekuasaan) (Stephan, Ybarra, & Bachman, 1999, p. 2222).

2. Ancaman simbolik (symbolic threat)

Ancaman ini berfokus pada perbedaan antar grup mengenai nilai, kepercayaan, moral dan sikap antara kedua kelompok. Ancaman simbolik dianggap sebagai ancaman “way of life” pada antar kelompok (Stephan & Stephan, 1996, p. 418). Ancaman simbolik tidak dapat dilihat secara nyata. Jadi, ancaman simbolik merupakan ancaman terhadap pandangan atau tata kehidupan suatu kelompok. Ancaman simbolik menjadi salah satu sumber timbul adanya prasangka karena merasa pandangan kelompoknya adalah paling benar, sehingga mereka merasa khawatir apabila nilai-nilai yang dianut oleh suatu kelompok dipengaruhi oleh pandangan atau nilai-nilai dari kelompok lain. Pendapat bahwa pandangan grupnya adalah yang paling benar juga terkait dengan identitas diri suatu kelompok.

Kedua ancaman tersebut berhubungan dengan konflik dalam pandangan dunia apabila terdapat perbedaan nilai, sikap dan kepercayaan masyarakat yang merasa terancam akan kehadiran orang asing. Individu maupun kelompok yang ada in group merasa terancam dalam hal self-image apalagi melakukan interaksi dengan individu out group, ancaman tersebut bisa menimbulkan rasa gelisah lebih lanjut (Stephan & Stephan, 1996, p. 33)

Apabila ditinjau melalui penerapan teori, in group ditujukan kepada masyarakat Jepang yang memiliki sentimen xenofobia, baik individu maupun kelompok sayap kanan. Sedangkan out group ditujukan untuk orang asing yang menetap di Jepang, dalam penelitian ini akan berfokus pada masyarakat keturunan dan imigran yang berasal dari Korea. Masyarakat Jepang merasa terancam identitas nasionalnya

karena adanya penduduk asing, baik yang berada di Jepang maupun imigran yang datang ke Jepang dengan tujuan ekonomi maupun politik. Muncul pendapat bahwa hak mereka direnggut oleh out group, seperti kesempatan kerja, politik maupun kesejahteraan sosial (Jozuka, 2018).

Selain itu, karena masyarakat Jepang menjunjung tinggi rasa nasionalisme, Masyarakat Jepang tidak menginginkan out group menjadi bagian dari mereka karena perbedaan identitas dan kultur yang membuat hal tersebut kemudian dikatakan akan mengancam identitas masyarakat Jepang sebagai negara homogen yang sudah menjadi identitas Jepang sejak dahulu (Lukfin, 2012). Jadi, aksi-aksi tersebut merupakan penyebabnya munculnya konflik antara masyarakat Jepang dengan masyarakat asing.

Pada dasarnya, teori ini berkaitan dengan ancaman yang mungkin akan dirasakan in group, dan bukan merupakan ancaman yang sebenarnya. Ancaman yang dirasakan mencakup semua ancaman yang diyakini anggota kelompok mereka alami, terlepas apakah ancaman itu sungguh-sungguh terjadi atau hanya sebuah persepsi. Sebagai contoh, bisa jadi kelompok merasa kesejahteraan ekonomi mereka terancam oleh out group yang mengambil peluang pekerjaan mereka. Namun kenyataannya, out group belum tentu berpengaruh pada peluang kerja mereka. Namun, mereka memiliki persepsi apabila keamanan pekerjaan mereka dibawah ancaman dapat meningkatkan tingkat prasangka mereka terhadap kelompok luar.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam menganalisa penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Studi kasus dilakukan pada metode ini dengan menggunakan teori untuk menganalisa dan menjawab rumusah permasalahan penelitian. Jenis penelitian kualitatif ini dapat dijabarkan sebagai sebuah proses yang mampu menghasilkan data deskriptif secara tertulis dari berbagai macam yang telah didapatkan selama melakukan penelitian (Moleong, 1989, pp. 2-3). Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif melalui pendekatan analisis deskriptif adalah sebuah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang terjadi serta memahami tentang subjek yang mengalami fenomena tertentu dalam penelitian dan memberi gambaran melalui data atau sampel yang telah terkumpul melalui data yang telah diambil.

1.8.2 Subjek Penelitian

Subjek yang dituju dalam bahasan penelitian ini adalah masyarakat Jepang yang mempunyai rasa sentimen xenofobia terhadap etnis Korea sebagai subjek utamanya.

1.8.3 Alat Pengumpul Data

Pada proses pengumpulan data, terdapat dua metode pengambilan data yang digunakan dalam penelitian, yaitu metode data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang berikblat pada informasi yang didspatkan dari peneliti tangan pertama yang terkait dengan variabel minat untuk tujuan studi secara spesifik. Data tersebut berasal dari laman resmi pemerintahan dan juga institusi lain seperti

kementerian-kementerian pada masing-masing negara yang terkait penelitian ini. Sedangkan pengertian dari data sekunder adalah data yang merujuk pada informasi yang telah terkumpul dari sumber yang tersedia. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan melalui pencarian dalam tulisan-tulisan ilmiah atau buku, jurnal maupun artikel yang berhubungan dengan penelitian.

1.8.4 Proses Penelitian

Menurut Prof. Dr. Suryana, ada beberapa tahap proses penelitian, diawali dengan mengidentifikasi masalah atau mencari pokok permasalahan yang paling relevan untuk diteliti, kemudian merumuskan masalah dengan memberikan arahan tentang pengumpulan data yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan tersebut, menyusun kerangka pemikiran, mencari kajian pustaka, yang dilanjutkan dengan mencatat hasil kajian dan hasil bacaan agar gagasan yang muncul dapat disimpan, dan menganalisis data (Suryana, 2010).

Tahap selanjutnya adalah mengkonseptualisasikan permasalahan yang menjadi pertanyaan dalam penelitian, kemudian dilanjutkan dengan menentukan landasan konseptual yang akan memperkuat hasil penelitian yang telah diolah. Selanjutnya, dilakukan pengumpulan data dan mengolah data yang telah didapat. Tahap terakhir, yaitu dengan melakukan analisa terkait dengan permasalahan yang diteliti hingga menemukan hasil yang relevan dalam penelitian. Terakhir, melaporkan hasil uji dari penelitian tersebut dengan sejelas-jelasnya (Gulo, 2002).

BAB II

PERKEMBANGAN FENOMENA XENOFOBIA DI JEPANG

Berdasarkan penjabaran yang telah ditulis dalam latar belakang dan landasan teori pada bab sebelumnya, bab ini penulis akan membahas mengenai perkembangan fenomena xenofobia yang terjadi di Jepang. Pembahasan ini ditulis melalui penulisan deskriptif dan akan terbagi ke dalam empat bagian. Penulis akan membahas mengenai identifikasi xenofobia melalui empat sub bab, yaitu sejarah masuknya xenofobia ke Jepang, identifikasi xenofobia melalui “Doudou Diene Report”, identifikasi peningkatan aksi xenofobia di Jepang tahun 2012 hingga 2015 dan yang terakhir adalah upaya pemerintah dalam menanggulangi fenomena xenofobia di Jepang.

2.1 Sejarah Masuknya Xenofobia terhadap Etnis Korea ke Jepang

Sentimen xenofobia terhadap etnis Korea di Jepang erat kaitannya dengan sejarah dan budaya. Pemikiran xenofobia sudah berkembang sejak lama di Jepang, diawali dengan tindakan diskriminasi terhadap etnis Korea. Sejak awal tahun 1900-an, orang Korea di Jepang telah diperlakukan sebagai kelompok yang berbeda, yang diharapkan untuk 'pulang' pada akhirnya. Karena itu, mereka menghadapi diskriminasi di banyak bidang termasuk pendidikan, pekerjaan, pernikahan, serta hak dan status hukum warga negara (Ahn, 2012, p. 49).

Salah satu sikap kontroversial terhadap etnis Korea tersebut adalah pada saat masa pendudukan Jepang terhadap Semenanjung Korea yang terjadi setelah tahun 1910, melalui perjanjian aneksasi Jepang-Korea (Chapman, 2008, p. 17). Perekonomian Jepang memburuk dan mengalami kekurangan tenaga kerja pada tahun 1920. Secara historis, ketika terjadinya perang dunia ke-2, pemerintah Jepang

membawa orang-orang Korea ke Jepang untuk mengisi kekosongan pekerja karena kurangnya tenaga kerja. Sebagian besar etnis Korea bekerja sebagai petani. Selain petani, banyak orang Korea menjadi pekerja kerah biru seperti pekerja pabrik, konstruksi bahkan sopir truk. Pekerja kerah biru dianggap sebagai pekerjaan yang tidak layak, sehingga mereka juga dibayar dengan upah yang rendah (Spice Digest, 2010).

Pada saat itu, hanya ada sedikit orang Korea yang tinggal di Jepang. Etnis Korea di Jepang sering kali berada dalam posisi yang dirugikan. Contohnya, murid Korea di Jepang. Statistik menunjukkan bahwa terdapat 10% orang Korea di Tokyo memiliki tujuan Pendidikan pada masa itu. Namun, proporsi tersebut masih kalah dengan jumlah petani Korea yang dibawa Jepang pada masa pendudukan. Pekerjaan yang tersedia bagi orang-orang Korea pada saat itu disebut dengan 3-D (dangerous, demanding, dirty). Mereka menjadi buruh kasar seperti di pabrik kaca dan pemintalan karet dan menerima upah rendah serta kondisi di bawah tekanan yang keras (Lee S. I., 2012, p. 4). Sehingga mayoritas masyarakat Jepang menganggap Korea sebagai lower class, etnis yang tidak berpendidikan dan lain sebagainya (Lie, 2008, pp. 4-5). Citra etnis Korea di mata Jepang sudah buruk sedari awal.

Berdasarkan faktor dan prasangka negatif di atas, kemudian muncul pembantaian terhadap etnis Korea pasca Gempa 'Great Kanto' pada tahun 1923. (Kumpis, 2015, p. 46). Peristiwa ini menjadi contoh kasus pertama xenofobia terhadap orang asing di Jepang. Surat kabar Jepang melaporkan desas-desus palsu bahwa etnis Korea akan melakukan pemberontakan pasca gempa tersebut dengan meracuni sumber penyuplai air yang ada. Rumor itu justru mengakibatkan

kemarahan warga Jepang yang mengakibatkan pembantaian etnis Korea oleh Jepang. Pembantaian ini membunuh lebih dari 6000 etnis Korea di Metropolitan Tokyo (Fukurai & Yang, 2018, p. 534). Berita palsu ini mengawali terjadinya sentimen anti Korea di Jepang. Kemudian, sentimen anti Korea terus berkembang di seluruh Jepang lebih dari tujuh dekade sejak peristiwa tersebut terjadi.

Etnis Korea yang menetap di Jepang ini disebut juga sebagai Zainichi. Zainichi merupakan warga negara Korea, secara permanen tinggal di Jepang namun tidak mendapatkan kewarganegaraan Jepang. Populasi dari Zainichi termasuk etnis Korea telah tinggal di Jepang sebelum perang dunia ke-2 (Morooka, 2016, p. 4). Pasca perang dunia ke-2, situasi sedikit mengalami perubahan. Namun, perubahan ini tidak dapat diklasifikasikan sebagai hal positif. Prasangka negatif terhadap etnis Korea sebelum perang dunia ke-2 sudah melekat kuat, dan Etnis Korea dipandang berkontribusi besar dalam peningkatan kriminalitas di Jepang (Lie, 2008, p. 147)

Etnis Korea (Utara) menjadi stateless dan Etnis Korea (Selatan) yang memilih untuk menetap dapat tetap tinggal di Jepang setelah Korea Selatan dan Jepang mempunyai hubungan diplomatik pada tahun 1965 (Hawon, 2019). Kemudian, status hukum masyarakat Korea di Jepang tidak stabil pada saat itu hingga tahun 1991, ketika peraturan mengenai special permanent residency terbentuk. Special permanent resident status diberikan kepada orang-orang asing yang kehilangan status kewarganegaraan Jepang nya pasca perjanjian perdamaian San Francisco pada tahun 1952 (The Japan Times, 2014). Selama masa ini, pemerintah Jepang memperlakukan etnis Korea di Jepang sebagai orang asing yang harus memperbarui status mereka sebagai penduduk setiap satu hingga empat tahun sekali. Kepolisian Jepang juga menyimpan catatan pendaftaran orang Korea, dan

mereka hidup hanya boleh memiliki satu kewarganegaraan saja di bawah perundang-undangan tentang the Nationality Act (Baird, 2018).

2.2 Perkembangan Xenofobia di Jepang Melalui “Doudou Diene Report”

Pada Juli tahun 2005, PBB mengutus seorang reporter khusus dengan spesialisasi diskriminasi dan xenofobia yang bernama Doudou Diene dengan melakukan aktivitas perjalanan ke Jepang selama 9 hari, pada tanggal 3 hingga 11 Juli 2005. Penelitian ini dilakukan oleh Diene dengan mencakup berbagai peristiwa xenofobia dan diskriminasi rasial dengan meneliti keadaan dari kelompok minoritas, juru kampanye anti-diskriminasi, pemerintah, serta pihak kepolisian yang ada di Jepang. Dalam laporan ini, Diene menulis latar belakang, Analisa mendalam serta rekomendasi dan konklusi dalam menangani xenofobia dan diskriminasi di Jepang. Laporan yang terangkum ini dinamakan dengan The Diene Report (United Nations, 2006, p. 2).

Diene menunjukkan sedikit latar belakang dari penelitian yang dia lakukan. Pada tahun 1996, Jepang menerapkan Konvensi Internasional tentang penghapusan diskriminasi rasial, dimana pemerintah berjanji untuk mengambil tindakan preventif yang berupa peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menghentikan diskriminasi berdasarkan keturunan, ras, warna kulit dan etnis. Namun, hingga satu dekade kemudian, ketika perjalanan ini dilakukan, Jepang masih belum memiliki undang-undang “anti-discrimination law” (Arudou, 2006). Pemerintah Jepang belum berupaya untuk mengesahkan peraturan tersebut di Jepang.

Doudou Diene juga menyatakan bahwa “Jepang sebagai salah satu kekuatan dunia dalam era globalisasi, sudah seharusnya lebih berani untuk merambah pada

dunia luar. Namun pada kenyataannya, masyarakat Jepang masih tertutup, baik secara spiritual maupun intelektual.” Hal ini dikemukakan Diene pada tahun 2005 (Hiroshi, Makoto, Kyongnam, Wetherall, & Katsuchi, 2006). Ketika laporan ini dibuat, masyarakat Jepang masih memegang teguh prinsip bahwa mereka akan menjaga keutuhan identitas nasional yang mereka miliki. Kritik tersebut dikeluarkan oleh Diene sebagai kritik terhadap masyarakat Jepang yang memiliki prasangka negatif terhadap orang asing selain masyarakat asli Jepang.

Berikut merupakan kutipan dari Diene dalam laporan yang berjudul “Racism, Racial Discrimination Xenophobia and All Forms of Discrimination”;

“Setelah mengumpulkan dan melakukan analisa dalam berbagai pandangan yang mencakup berbagai pihak terkait, Reporter khusus PBB, Doudou Diene menyimpulkan bahwa terdapat diskriminasi rasial dan perilaku xenofobia di Jepang yang melibatkan tiga kelompok yang mengalami tindakan diskriminasi, yaitu etnis minoritas, masyarakat keturunan bekas koloni dan imigran asing.” (United Nations Commission on Human Rights, 2006, p. 2).

Kutipan dari laporan Diene berisi tentang tiga kelompok masyarakat yang mengalami diskriminasi, yaitu etnis minoritas nasional Jepang (Buraku, Ainu, Okinawa), masyarakat keturunan bekas koloni (khususnya etnis Korea dan Tiongkok sebagai yang terbesar) serta imigran asing (pendatang yang tinggal maupun bekerja dari Asia dan seluruh belahan dunia seperti Filipina, Thailand, Brazil, dan lain sebagainya). Pada penelitian ini, penulis hanya akan membahas masyarakat minoritas keturunan bekas koloni dan imigran asing dari Korea Selatan.

2.2.1 Masyarakat Keturunan Bekas Koloni (Zainichi)

Meskipun Jepang sangat menjunjung tinggi pada homogenitas etnisnya, sebenarnya ada beberapa etnis lain di Jepang. Terdapat beberapa masyarakat keturunan yang berada di Jepang, Etnis Korea menjadi etnis terbesar yang tinggal di Jepang setelah etnis China. Dari beberapa etnis yang menetap di Jepang, yang paling merasakan dari sentimen xenofobia yang ada di Jepang adalah Zainichi Korea (Yamashiro, 2013). Etnis Korea telah menetap di Jepang lebih dari satu abad lamanya ketika terjadinya kolonialisasi Jepang yang mendorong para Zainichi melakukan migrasi ke Jepang demi keselamatan mereka.

Secara historis, Zainichi generasi pertama harus menerima diskriminasi yang tiada hentinya dari masyarakat asli yang disebabkan oleh perbedaan latar belakang etnis serta status sosial mereka. Etnis Korea menerima diskriminasi karena latar belakang etnis dan second-class status mereka pada saat itu. Bahkan, generasi kedua Zainichi juga menerima perlakuan yang serupa meskipun mereka lahir dan besar di Jepang (Im-Lee, 2012, p. 2). Mereka harus di tengah munculnya berbagai pandangan negatif tentang etnis mereka serta perlakuan diskriminatif yang mereka terima dalam masyarakat. Karena pandangan negatif tersebut, Hal inilah yang menyebabkan munculnya krisis identitas dari dalam setiap generasi Zainichi.

Hingga saat ini cukup sulit untuk mengidentifikasi berapa banyak Zainichi Korea yang tinggal di Jepang, karena situs statistik demografi resmi di Jepang tidak memiliki kategori untuk ras dan etnis. Menurut Immigration Bureau of Japan mencatat terdapat ada sekitar 2 juta imigran asing terdaftar di Jepang dan 545.000 orang asing diantaranya terdaftar sebagai orang Korea pada akhir tahun 2011 (Itagaki, 2015, p. 51). Tetapi, tidak semuanya merupakan imigran. Beberapa dari mereka merupakan bagian dari Zainichi, yang memiliki perbedaan dengan imigran

dari Korea. Kurang lebih 40% dari semua orang asing yang terdaftar di Jepang terdaftar adalah etnis Korea (Visocnik, 2016, p. 231). Saat ini, Zainichi yang menetap di Jepang merupakan generasi ketiga maupun keempat. Beberapa dari Zainichi Korea generasi ketiga maupun keempat sudah tidak dapat berbicara bahasa manapun kecuali bahasa Jepang (Martel & Laurent, 2019, p. 10). Setelah tiga generasi terlewati, sejauh ini mereka hanya memiliki status ‘special permanent resident’. Status ini merupakan posisi yang unik dalam kehidupan masyarakat Jepang. Mereka mendapat perlakuan berbeda karena dianggap sebagai orang asing, meskipun dilahirkan dan menjalani seluruh kehidupan mereka di Jepang. Terlepas dari bentuk kesamaan masyarakat Jepang dan Korea dalam penampilan fisik, etnis Korea juga kerap kali mendapat diskriminasi meskipun secara kultural dan sosial mereka telah menjadi bagian dari masyarakat Jepang.

Perbedaan yang etnis Korea dapatkan terjadi karena hukum kewarganegaraan Jepang yang mengadopsi asas jus sanguinis. Asas ini memiliki prinsip bahwa anak yang lahir memperoleh kewarganegaraannya berdasarkan keturunan, mengikuti kewarganegaraan asli orang tua mereka tanpa melihat di mana mereka dilahirkan. Sehingga kewarganegaraan Jepang hanya bisa didapatkan apabila salah satu atau kedua orang tua merupakan asli Jepang. Naturalisasi menjadi warna negara Jepang sangat mungkin untuk terjadi, namun melewati proses birokratis yang cukup rumit, dimana seseorang harus mengubah nama Koreanya menjadi nama Jepang, karena Jepang tidak mengakui kewarganegaraan ganda (Visocnik, 2016, p. 231). Jadi, apabila seseorang ingin melakukan naturalisasi, seseorang tersebut harus siap untuk meninggalkan kewarganegaraan Koreanya.

2.2.2 Imigran Asing

Selain Zainichi Korea, imigran asing yang berasal dari Korea Selatan juga turut menjadi ‘korban’ masyarakat Jepang dalam melampiaskan sikap xenofobia. Para imigran Korea yang datang ke Jepang tentu bertujuan untuk kehidupan yang lebih baik dari pada negara asalnya, namun dapat dikatakan akan membawa masalah lain. Masyarakat Jepang menganggap bahwa imigran asing hanya datang untuk merebut hak yang dimiliki masyarakat asli, karena sebagian besar dari mereka memiliki tujuan ekonomi, sehingga berpindah dari satu tempat ke tempat lain (Jozuka, 2018).

Munculnya sentimen xenofobia terhadap imigran asing berawal dari isu imigrasi yang saat ini masih menjadi perdebatan di dalam negeri, karena Jepang yang dikenal sebagai “closed door country” (Akashi, 2014, p. 178). Jepang telah menyadari krisis demografi yang telah membayangi selama beberapa dekade belakangan, namun karena pemerintah enggan mengambil langkah efektif, permasalahan yang terjadi semakin mendesak.

Angka kelahiran yang semakin menurun menyebabkan pertumbuhan populasi mengalami ketidakseimbangan, populasi penduduk Jepang semakin menua dan angkatan muda menyusut, sehingga membentuk piramida terbalik. Fenomena ini kemudian dikenal sebagai fenomena aging population (Kenji, 2012). Akibat terjadinya ketidakseimbangan rasio, Jepang mengalami krisis ketenagakerjaan dimana tenaga kerja produktif yang berusia dibawah 40 tahun mengalami penurunan setiap tahunnya. (Banas, 2018, p. 2) Sebaliknya, fakta di lapangan menunjukkan bahwa angkatan kerja Jepang terbukti tidak mampu mengisi kekosongan lapangan kerja karena kondisi demografi Jepang yang

memprihatinkan, angkatan tua lebih banyak daripada angkatan muda (Tsuya, 2012, p. 5). Sehingga, pemerintah Jepang mulai menerima kehadiran pekerja asing dengan predikat high-skilled workers untuk mengatasi permasalahan demografinya (Japan Today, 2014).

Namun, keputusan pemerintah Jepang tidak mendapatkan respon baik dari masyarakat. Masyarakat Jepang sendiri cenderung memiliki prasangka negatif terhadap hadirnya imigran asing yang bekerja di Jepang (Kikuchi, 2017). Kekhawatiran masyarakat terhadap peningkatan imigran asing, termasuk kehadiran imigran Korea menimbulkan keresahan masyarakat, karena tidak hanya memberikan dampak kehilangan pekerjaan dan gangguan budaya, tetapi juga ketakutan akan lonjakan tindakan kriminal yang mereka lakukan. Masyarakat merasa resah dan tidak aman. Masyarakat sering kali menyalahkan kehadiran mereka sebagai penyebab dari negara mengalami kemunduran dan juga dianggap sebagai penyebab sumber daya terenggut (Lukfin, 2018). Berbagai keresahan tersebut menyebabkan sentimen xenofobia muncul di kalangan masyarakat.

Jepang dengan hati-hati membuka imigrasinya terhadap imigran asing untuk membantu menyelesaikan krisis demografi Jepang, meningkatkan perlakuan baik terhadap orang asing menjadi hal yang crucial demi masa depan Jepang. Sehingga hal tersebut menjadi sebuah tantangan bagi pemerintah Jepang yang memiliki masyarakat dengan pandangan konservatif yang mendalam untuk merekrut lebih banyak tenaga kerja asing pada berbagai bidang tertentu dengan syarat dan program tentu yang berlaku (Koizumi, 2019).

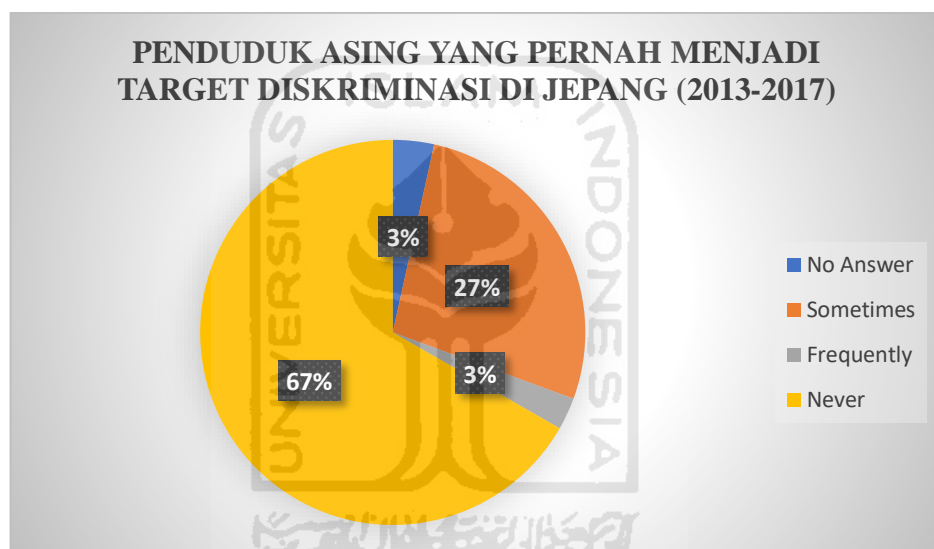
2.3 Fakta Meningkatnya Perilaku Xenofobia di Jepang (2012-2015)

Peningkatan fenomena xenofobia yang menargetkan masyarakat bukan asli Jepang, khususnya para etnis Korea yang tinggal di Jepang bukan merupakan hal yang baru. Ilmuwan sosial telah memperhatikan kejahatan rasial yang dilakukan terhadap etnis Korea beberapa tahun terakhir, dan mereka mengidentifikasi fenomena xenofobia tersebut sebagai ketakutan terhadap orang asing (Park S. , 2017, p. 65). Banyak jurnalis yang telah memperhatikan tren xenofobia yang berkembang di masyarakat Jepang yang cenderung condong ke kanan, yang sering disebut sebagai Ukei-ka. Tren ini mulai dikenal melalui meningkatnya aksi kebencian yang dilakukan oleh kelompok esktremis sayap kanan yang disebut dengan hate speech (Asahina, 2019, p. 2).

Istilah hate speech atau heito supiiichi dalam Bahasa Jepang terpilih sebagai salah satu dari sepuluh kata kunci nasional teratas pada tahun 2013. Hate speech menjadi topik tehangat jika berbicara tentang etnis Korea di Jepang. Sejak saat itu, berbagai macam artikel berkembang pesat secara masif, bahkan lebih dari 7000 artikel terbit pada surat kabar utama di Jepang dalam beberapa tahun terakhir (Kitayama, 2018, p. 255). Hal ini menunjukkan adanya kesadaran masyarakat umum tentang tindakan kebencian terhadap etnis minoritas.

Zaitokukai merupakan komunitas xenofobia di Jepang yang muncul pada 20 Januari 2007 yang diketuai oleh Makoto Sakurai dengan menggunakan media internet untuk mengorganisir para anggotanya. Melalui website resminya, pada Juni 2013 jika ditotal kelompok ini memiliki lebih dari 13.000 anggota resmi termasuk 1.900 anggota wanita di dalamnya (Shibuichi, 2015, p. 722). Zaitokukai merupakan kelompok terbesar yang menyuarakan tindakan xenofobia di Jepang. Mereka telah

banyak melancarkan aksi hate speech yang menimbulkan berbagai macam kontroversi karena melakukan diskriminasi rasial terhadap etnis Korea di Jepang. Tercatat bahwa angka demonstrasi xenofobia yang dilakukan oleh berbagai grup ekstremis Zaitokukai menyebar dengan cepat ke berbagai penjuru kota di Jepang, seperti Tokyo, Osaka, Kyoto, Kobe, Sapporo dan Kawasaki (LAZAK, 2014, p. 16). Berikut adalah hasil target diskriminasi yang dilakukan oleh Zaitokukai selama kurun waktu 2013 hingga 2017:



Grafik 1: Grafik penduduk asing di Jepang yang pernah menjadi target diskriminasi 2013-2017 (Mainichi, 2017)

Menurut hasil survei yang dilakukan oleh Justice Ministry yang dipublikasikan pada tanggal 31 Maret 2017, lebih dari 29.8% orang asing yang menetap di Jepang pernah merasakan diskriminasi selama kurun waktu 5 tahun belakangan. Survei ini dilakukan pada bulan November hingga Desember pada tahun 2016 dan dilakukan 4252 terhadap penduduk asing yang berumur 18 tahun keatas, termasuk beberapa etnis Korea yang memiliki status ‘special permanent

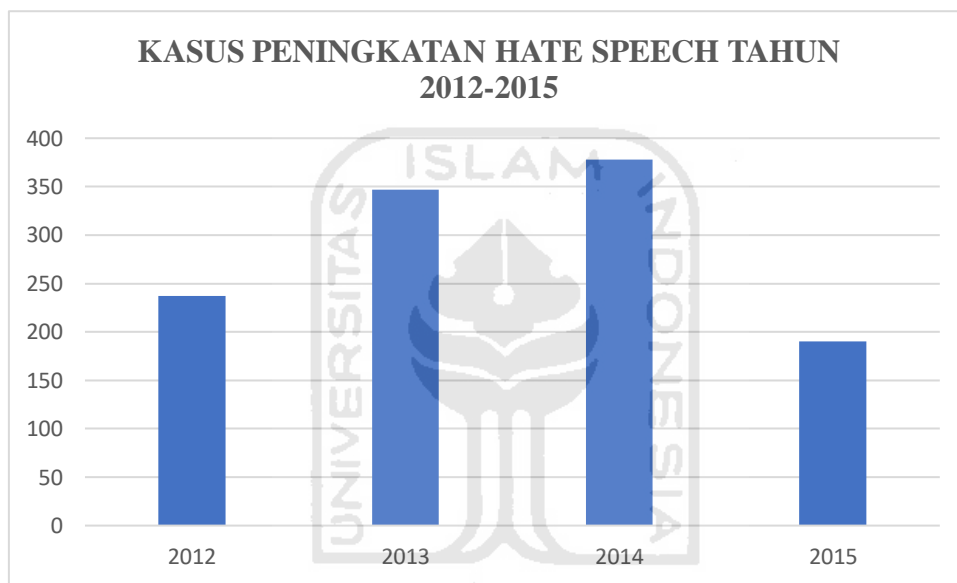
resident' ikut melakukan survei ini. 147 responden atau 3% orang menjawab no answer atau unclear, 1154 atau 27% orang menjawab sometimes, 115 responden atau 3% orang menjawab frequently dan 2836 responden atau 67% orang menjawab never.

Fenomena hate speech di Jepang cenderung menjadikan orang-orang Korea sebagai target dari aksi kebencian mereka. Berbagai kata-kata kasar muncul, seperti “Pergilah dari negara kami!”, “Bunuh orang-orang Korea!” atau “Orang Korea, baik maupun jahat harus dibunuh!” kata-kata kebencian tersebut sering kali muncul ketika terdapat aksi unjuk rasa maupun demonstrasi yang dilakukan oleh berbagai kelompok esktremis sayap kanan Zaitokukai (The Economist, 2014). Aksi xenofobia di Jepang mengalami kenaikan dan penurunan seiring berjalannya waktu, dengan peningkatan mulai terjadi pada tahun 2012 dan puncak tertinggi pada tahun 2014 (Mainichi, 2016).

Tak lama sebelum pecahnya hate speech yang meningkat pada tahun 2012, pada bulan Desember 2009, anggota Zaitokukai menyerbu sekolah dasar Kyoto Chōsen Dai-ichi, sebuah sekolah yang dioperasikan oleh organisasi pro-Korea Utara (Chongryon). Pada insiden ini, para demonstiran meneriakkan kalimat-kalimat kebencian melalui pengeras suara selama jam sekolah berlangsung. Zaitokukai menuduh bahwa sekolah ini menempati taman umum secara illegal untuk bermain murid-murid sekolah dasar. Kata-kata kasar seperti “You are the children of spies”, or “Korean schools out of Japan!” keluar saat demonstrasi berlangsung (Itagaki, 2015, p. 49).

Kemudian, xenofobia mengalami kenaikan dan penurunan sejak tahun 2012 hingga tahun 2015. terkumpul lebih dari 1152 kasus ujaran kebencian yang

dilaporkan oleh Justice Ministry pada bulan Maret 2016. Sebelum tahun 2012, hanya terdapat belasan hingga puluhan kasus saja per tahunnya walaupun tidak teridentifikasi dengan jelas jumlahnya. Kemudian, pada tahun 2012 aksi hate speech meningkat secara signifikan karena terdapat pemicu memanasnya aksi ini. (Mainichi, 2016). Berikut grafik mengenai peningkatan aksi xenofobia di Jepang dari tahun ke tahun;



Grafik 2: Grafik peningkatan tindakan xenofobia (hate speech) dari tahun ke tahun (Mainichi, 2016)

Dari grafik 2 mengenai peningkatan tindakan xenofobia di Jepang, dapat disimpulkan bahwa:

1. Sejak tahun 2012 hingga tahun 2014, jumlah kasus xenofobia mengalami peningkatan, peningkatan tersebut terlihat setiap tahunnya. 237 aksi hate speech tercatat pada tahun 2012, 347 kasus pada tahun 2013 dan 378 kasus pada tahun 2014.

2. Kemudian pada tahun 2015, hate speech mengalami penurunan menjadi 190 kasus. Menurunnya kasus hate speech pada tahun 2015 diduga karena muncul desas-desus yang tersebar di berbagai media mengenai undang-undang anti hate-speech “The Hate Speech Act” yang akan ditetapkan oleh pemerintah Jepang pada tahun 2016, karena pemerintah Jepang mendapatkan tekanan internasional karena kekhawatiran terhadap peningkatan sentimen xenofobia. (Boyd, 2015).

Jumlah dari tindakan hate speech tersebut hanya estimasi dan kemungkinan besar bisa beberapa kali lipat lebih besar dari jumlah yang telah dilaporkan. Aksi ini terjadi hampir setiap minggu terjadi dan mencapai beratus-ratus kasus dilaporkan per tahunnya.

Penjelasan tentang alasan masyarakat Jepang memiliki prasangka negatif terhadap etnis Korea telah dibahas oleh banyak jurnal dan berbagai media lainnya, sama halnya dengan alasan mengapa Jepang bersikap negatif terhadap para imigran Korea. Pertama, hubungan politik yang berfluktuasi antara Korea Selatan dan Jepang telah berlanjut selama beberapa dekade. Masalah sosio-historis, terutama mengenai sengketa pulau telah memperburuk hubungan Korea Selatan dan Jepang selama beberapa tahun terakhir (Zhang, 2015, p. 212). Peningkatan hate speech sebagian besar didorong oleh bentrokan politik antara pemerintah Jepang dan pemerintah Korea Selatan. Peningkatan ini secara signifikan diduga setelah Presiden Korea Selatan, Lee Myung-Bak melakukan kunjungan secara diam-diam ke Dokdo (Takeshima) pada Agustus 2012 tanpa melakukan perizinan terlebih dahulu kepada pemerintah Jepang (Deutsche Welle, 2013). Semenjak kejadian tersebut, perasaan masyarakat Jepang yang memiliki sentimen terhadap etnis Korea

semakin memanas. Didukung dengan fakta bahwa Shinzo Abe seorang yang konservatif menjadikan aksi protes xenofobia yang dilakukan oleh grup ekstremis sayap kanan, menjadi sangat provokatif dan semakin merajalela (Ito M. , 2013).

Sejak awal tahun 2012, ketika sengketa wilayah antara Korea Selatan dan Jepang kembali memanas, Zaitokukai kembali aktif melakukan demonstrasi di jalan yang dilakukan hampir setiap akhir pekan. Demonstrasi anti Korea meningkat secara signifikan, aksi kebencian yang dilakukan terkonsentrasi pada daerah-daerah yang memiliki banyak penduduk Korea, seperti distrik Shin-Okubo di Tokyo dan distrik Tsuruhashi di Osaka. Dimulai dari demonstrasi yang dilakukan di Tsuruhashi, Osaka pada 24 Februari 2012. (Sato, 2013). Selanjutnya, pada tahun yang sama terjadi peningkatan yang cukup signifikan terhadap sentimen xenofobia akibat adanya aktivitas kelompok sayap kanan di Jepang yang kembali aktif.

Kemudian, pada 9 Februari dan 24 Februari 2013, Shin-Okubo di distrik Tokyo dan Tsuruhashi di distrik Osaka. Kedua daerah ini dikenal sebagai Korea Town di Jepang dan di tempat ini banyak menjual produk budaya Korean pop atau K-pop dan terkenal dengan banyak restoran Korea. Sekitar 100-200 orang berkumpul dan menyuarakan kebencian secara verbal terhadap orang-orang Korea menggunakan pengeras suara. Berikut merupakan contoh kebencian verbal yang keluar dari grup xenofobia Zaitokukai ketika melakukan demonstrasi;

“Koreans are parasite, criminal!”, “Koreans are illegal migrants, they should die!”, “You Koreans are cockroaches, go home!”, “Spies of North Korea, get out of Japan!”, “If you hate Japan, why don’t you go home?”, “Comfort women are prostitutes and liars.”

Kata-kata tersebut adalah salah satu bentuk pernyataan yang diteriakkan oleh para rasis Jepang selama terjadinya demonstrasi dan propaganda di jalanan. Beberapa polisi diketahui berada di kedua area tersebut ketika terjadinya demonstrasi, namun mereka tidak melakukan tindakan apapun untuk mencegah hate speech dari para peserta demonstrasi (Ito K. , 2014, p. 434). Pada saat itu, pemerintah Jepang belum memberlakukan hukum mengenai anti-diskriminasi maupun pelarangan tindakan serangan verbal. Karena tidak ada hukum resmi yang mengatur aksi tersebut, maka aksi yang dilakukan oleh grup ekstremis sayap kanan sejauh adalah tindakan legal karena mereka beranggapan tindakan tersebut merupakan bagian dari freedom of speech (Penney, 2012).

Sebuah survei dilakukan oleh the Korea Economic Daily pada Desember 2013 terhadap 900 masyarakat Jepang. Hasil survei menunjukkan bahwa hampir 10% dari mereka berkata bahwa produk yang diproduksi oleh Korea sangat memuaskan, namun mereka juga mengatakan bahwa tidak akan membeli barang-barang tersebut hanya karena “made in Korea” (Si-Soo, 2014).

Kemudian pada 8 Maret 2014, pada pertandingan sepak bola di Saitama Stadium, pendukung dari klub regional (The Urawa Reds) menggantungkan spanduk di depan gerbang ke kursi penggemar yang bertuliskan 'Japan Only', karena ada beberapa pemain bola yang diketahui merupakan orang Korea di dalam klub. Mengetahui hal itu, klub tersebut masih tetap menyelesaikan pertandingan tanpa menghentikannya (LAZAK, 2014, p. 17). Aksi xenofobia tidak hanya terjadi di jalanan saja, tetapi sudah sampai hingga titik lain seperti sekolah-sekolah Korea sehingga menimbulkan keprihatinan yang cukup serius namun tidak pernah mendapatkan konsekuensi hukum yang jelas.

Aksi kebencian tidak hanya terjadi secara langsung, tetapi juga secara tidak langsung atau online melalui berbagai platform sosial media. Ujaran kebencian secara online di Jepang memang menargetkan hampir semua etnis minoritas, terutama berdampak pada etnis Korea. Beberapa dari mereka cenderung menahan diri dari penggunaan internet karena takut melihat komentar kebencian yang ditujukan kepada mereka (Kyodo, 2016). Menurut survei yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2017 tentang penggunaan internet dikalangan orang asing, lebih dari 40% pengguna internet non-Jepang menemukan artikel xenofobik atau diskriminatif yang menunjukkan keinginan untuk mengusir penduduk asing dari Jepang. Hampir 65% dari mereka menganggap rasisme dan xenofobia melalui internet adalah tindakan 'unpleasant', sedangkan hampir 20% pengguna mengatakan bahwa mereka lebih memilih menahan diri untuk tidak menggunakan internet untuk menghindari konten kebencian (Tanaka, 2017).

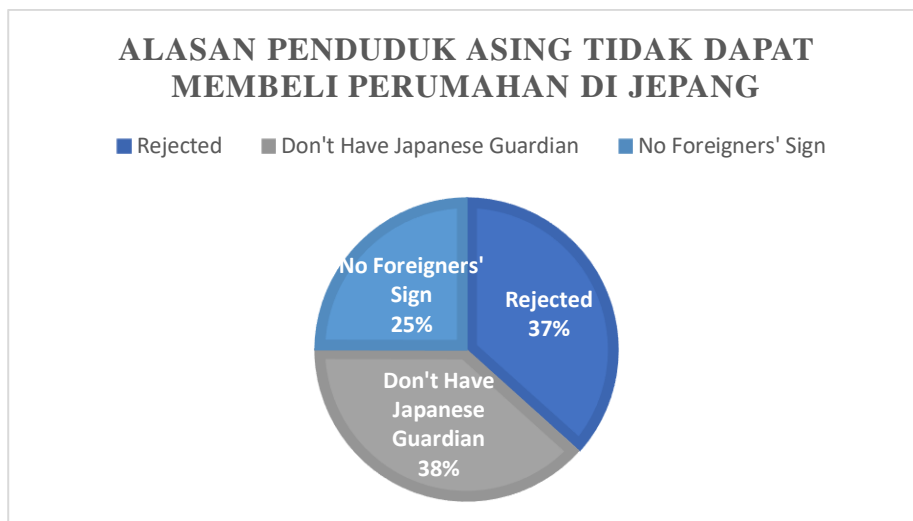
Kelompok sayap kanan Zaitokukai juga diketahui juga merilis video yang direkam oleh anggota kelompok yang melakukan hate speech dan mengunggahnya ke berbagai situs internet. Mereka berharap dengan cara itu mereka lakukan untuk menjaring lebih banyak anggota kelompok (Kyodo, 2015). Ujaran kebencian dan berita palsu yang menghasut diskriminasi terhadap orang-orang Korea masih terus tersebar luas di internet. Tidak adanya langkah-langkah untuk mengontrol ujaran kebencian melalui internet menghambat kebebasan ekspresi di antara etnis minoritas di Jepang, terutama terhadap etnis Korea.

Kemudian, menurut sebuah survei yang dilakukan oleh Organization of United Korean Youth in Japan pada Juni 2013 hingga bulan Maret 2014, lembaga tersebut melakukan survei sebanyak 200 orang yang merupakan Korean residents

dan Korean Japanese yang berumur kurang dari 30 tahun. Dampak negatif yang mereka rasakan sebagai orang asing di Jepang adalah lebih dari 1/3 dari mereka menghindari diskusi mengenai sejarah mengenai Korea dan Jepang serta menghindari untuk mengekspresikan opini mereka melalui internet. Kehilangan kepercayaan diri juga terlihat, seperti “Aku sering menghindar ketika diketahui sebagai keturunan Korea-Jepang atau orang Korea di hadapan orang Jepang” atau “Aku merasa buruk akan identitas asliku sebagai orang Korea”, dan lain sebagainya (LAZAK, 2014, p. 33). Keberadaan orang asing dan orang-orang yang memiliki perbedaan latar belakang budaya merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan.

Bentuk praktik xenofobia lain yang ada pada masyarakat adalah orang asing mendapatkan ‘housing discrimination’. Masyarakat non-Jepang kesulitan untuk memiliki atau menyewa rumah hanya karena mereka bukan masyarakat asli Jepang. Hampir 40% dari penduduk asing, termasuk etnis Korea yang mencari perumahan dalam kurun waktu lima tahun belakangan telah melewati pengalaman penolakan, menurut survei yang dilakukan oleh Justice Ministry (Osumi, 2017).

Berikut adalah grafik mengenai housing discrimination yang dialami oleh masyarakat non-Jepang:



Grafik 3: Grafik alasan penduduk asing tidak dapat membeli perumahan di Jepang (Osumi, 2017).

Menurut laporan yang dilansir oleh Justice Ministry pada bulan Maret 2017, terdapat 2044 penduduk asing yang mencari sewa rumah atau apartemen untuk tempat tinggal dalam 5 tahun terakhir (2013-2017), 39% atau 804 orang dilaporkan ditolak dalam melakukan kontrak sewa rumah karena mereka bukanlah masyarakat asli Jepang. 41% atau 843 orang diantaranya tidak bisa membeli rumah karena tidak memiliki penjamin asli Jepang, dan yang terakhir 20% atau 548 orang menyerah untuk mencoba karena adanya tanda ‘no foreigners’ terpampang nyata pada perumahan yang akan disewa atau beli.

Lalu, menurut laporan yang ditulis oleh seorang jurnalis ternama, Koichi Yasuda, orang-orang yang sempat diwawancarai oleh Yasuda bersikeras berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan oleh anggota Zaitokukai merupakan perjuangan melawan diskriminasi terbalik (reverse discrimination) (Yamaguchi, 2013, p. 99). Mereka mempercayai bahwa orang-orang Korea yang tinggal di Jepang mendapatkan privilege atau keistimewaan dari pemerintah Jepang. Mereka

merasa bahwa terdapat ketidakadilan dan hak-hak mereka sebagai warga negara dilanggar, dan bagi mereka, hanya masyarakat asli Jepang saja yang berhak menikmati keistimewaan dari pemerintah Jepang.

Beberapa peneliti mempercayai bahwa xenofobia yang terjadi di Jepang adalah karena ketakutan masyarakat asli Jepang akan budaya dari luar yang akan mempengaruhi identitas nasional mereka. Sedangkan peneliti lain berpendapat bahwa masyarakat Jepang juga memiliki ketakutan akan pekerjaan mereka yang bisa saja diambil oleh orang asing (Zhang, 2018, p. 208). Karena banyaknya hate speech yang dilakukan oleh kelompok ekstremis sayap kanan, orang-orang Korea yang menetap di Jepang sering kali merasa was-was dan dalam posisi yang terancam. Ketakutan-ketakutan ini yang menjadikan sikap xenofobia semakin mengental pada masyarakat Jepang.

Terdapat beberapa argumen yang dikemukakan oleh kelompok Zaitokukai yang tercantum dalam website resminya terkait dengan aksi hate speech yang dilakukan oleh kelompok ini lakukan ketika terjadinya demonstrasi maupun propaganda di jalan. Argumen-Argumen ini disebut juga sebagai Zaitokukai's "four pillars";

1. Special Permanent Resident (Tokubetsu Eijuu Shikaku)

Zainichi Korea mendapatkan status khusus "permanent resident" secara legal ketika etnis lainnya yang berada di Jepang tidak mendapatkan hal yang sama. Poin ini merupakan argumen utama alasan Zaitokukai didirikan.

2. Korean School Subsidiation (Chosen Gakkou Hojou Koufu)

Pemerintah Jepang memberikan subsidi kepada sekolah-sekolah Korea, meskipun secara teori sekolah tersebut tidak memenuhi syarat untuk

mendapatkan subsidi. Mereka juga diduga menyebarkan nilai-nilai komunisme dan propaganda anti Jepang

3. Welfare Benefit Preferential Treatment (Seikatu Hogo Yuuguu)

etnis Korea mendapat privilege untuk tidak membayar pajak, biaya langganan NHK (siaran nasional Jepang) dan biaya air. Zaitokukai juga beranggapan bahwa Korea menerima jaminan sosial, maka dari itu masyarakat Korea tidak perlu bekerja.

4. Alias Dispensation (Tsuumei Seido)

Korea dapat menggunakan nama aliasnya (nama Jepangnya). Keistimewaan tersebut berupa dispensasi agar dapat menggunakan nama aliasnya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika melakukan tindakan kriminal, hanya nama Jepangnya saja yang dilaporkan, sedangkan nama Korea mereka dapat disembunyikan dan tidak dilaporkan (Ito K. , 2013, p. 436).

Setiap kali terjadi tindakan kebencian, ahli hukum yang mendukung ideologi negatif tersebut hanya menganggap bahwa hal tersebut adalah bagian dari kebebasan berpendapat dan dapat dikatakan legal karena belum ada hukum yang mengatur secara resmi (Alix, 2016, p. 8). Pemerintah Jepang menyatakan bahwa ketentuan yang tertulis pada artikel 4 dari International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination atau ICERD pada tahun 1995 mengenai larangan pidato kebencian rasial belum layak untuk dijadikan undang-undang (Morita, 2015, p. 3). Mengingat bagaimana berbagai bentuk tindakan kebencian yang dilakukan oleh masyarakat Jepang dan sikap diskriminatif pemerintah Jepang terhadap etnis Korea, bukan hal yang aneh apabila pemerintah

Jepang terlihat enggan untuk mengesahkan undang-undang mengenai kebencian rasial.

2.4 Kebijakan Pemerintah Jepang dalam Meredam Peningkatan Xenofobia di Jepang

Peningkatan xenofobia pada tahun 2012 hingga 2015 terjadi pada masa pemerintahan Shinzo Abe periode ke-2. Sejak awal menjabat, Abe dikenal sebagai seseorang yang konservatif, terutama dalam hal kebijakan luar negeri dan lebih memilih mengambil sikap konfrontatif terhadap negara-negara di Asia Timur (Ohi, 2018). Banyak jurnalis yang mengkespresikan keprihatinannya atas meningkatnya “nasionalisme” dibawah pemerintahan Shinzo Abe.

Pada desember 2012, Menteri Pendidikan Jepang, Shimomura Hirobumi juga mengumumkan bahwa pemerintah Jepang telah mengubah kebijakannya untuk tidak mengikutsertakan sekolah Korea dari subsidi biaya pada pendaftaran sekolah menengah (Itagaki, 2015, p. 60). Pemerintah terlihat melakukan kebijakan diskriminatif terhadap etnis Korea.

Namun, pada masa pemerintahan Shinzo Abe periode ke-2, Abe memperketat kebijakan imigrasinya dengan hanya mengizinkan high-skilled workers yang bekerja di Jepang (Gelin, 2020). Pemerintah memilih opsi ini karena dapat menanggulangi dua hal dalam satu kebijakan, pertama meredam isu xenofobia yang mengalami peningkatan di Jepang. Di sisi lain mengatasi isu kekurangan tenaga kerja, sehingga Jepang membutuhkan tenaga kerja asing untuk mengisi kekosongan tenaga kerja karena Jepang mengalami isu penuaan populasi.

Meskipun Abe dikenal sebagai seseorang yang konservatif, Abe sangat menyayangkan aksi kebencian yang dilakukan oleh grup ekstremis sayap kanan.

Abe memberikan kritik dan mengatakan bahwa pemerintahannya akan melakukan semua yang mereka bisa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Abe juga menyebut bahwa hate speech merupakan tindakan yang “extremely discomforting, unpleasant and unfortunate” (Japan Today, 2015). Selain itu, Abe juga mengatakan, "I believe that the Japanese people respect harmony and shouldn't exclude other people. The Japanese way of thinking is to behave politely and to be generous and modest at all times." (McCurry, 2013).

The United Nations Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) merekomendasikan dengan keras bahwa pemerintah Jepang harus segera mengatur perundang-undangan tentang larangan aksi hate speech terutama mengenai diskriminasi rasial terhadap etnis Korea dan minoritas lainnya. Komisi ini menyayangkan aksi sentimen xenofobia terhadap etnis Korea di distrik Tsuruhashi di Osaka dan distrik Shin-Okubo di Tokyo. Merupakan wilayah yang sebagian besar dihuni oleh orang Korea, (Ishibashi, 2017, p. 346).

Berdasarkan berbagai pertimbangan yang ada, Komite bersikeras bahwa Jepang harus mengambil langkah-langkah yang tepat seperti:

1. Menangani manifestasi kebencian dan rasisme secara cepat dan efektif untuk menghentikan bentuk kebencian diskriminasi dan rasisme selama demonstrasi
2. Mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memerangi kebencian berbicara di media, termasuk internet
3. Menyelidiki dan, jika perlu, menuntut individu maupun organisasi yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut

4. Memberikan sanksi yang setimpal terhadap pejabat publik dan politisi yang menyebarkan pidato kebencian
5. Mengatasi akar penyebab aksi kebencian rasial dan memperkuat langkah-langkah pengajaran, pendidikan, budaya dan informasi (Committee on the Elimination of Racial Discrimination, 2014)

Rekomendasi ini dibuat bertujuan untuk mengurangi prasangka yang mengarah pada diskriminasi rasial dan untuk mempromosikan pemahaman, toleransi dan rasa kekerabatan di antara negara-negara, baik ras atau etnis kelompok yang berbeda.

Tekanan dari Internasional tersebut membuat Gubernur Tokyo, Yoichi Masuzoe juga menekan Shinzo Abe untuk segera meresmikan undang-undang mengenai hate speech karena pemerintah Jepang berada di bawah tekanan Internasional untuk segera mengatur perundang-undangan tersebut, meskipun pada awalnya pemerintah Jepang terlihat enggan untuk mengesahkan undang-undang mengenai diskriminasi rasial karena alasan sosial masyarakat Jepang demi mempertahankan identitas nasionalnya (Richards, 2014).

Meskipun masih banyak yang harus dilakukan, ada beberapa perkembangan positif yang juga harus diperhatikan, di mana lembaga-lembaga publik pun turut memulai menunjukkan pergerakannya. Pengadilan telah mengeluarkan surat perintah sementara terhadap mengadakan demonstrasi aksi kebencian di tempat-tempat tertentu. Sementara itu, pasukan kepolisian juga telah meningkatkan pengawasan dan kontrol dari aksi demonstrasi (Mainichi Japan, 2017). Langkah-langkah tersebut tampaknya memiliki dampak nyata dengan mulai menurunnya aksi hate speech pada tahun 2015 menjadi 190 kasus.

Salah satu bentuk bukti nyatanya adalah Pengadilan Tinggi Osaka yang menjatuhkan denda terhadap grup ekstremis sayap kanan Zaitokukai. Mereka diwajibkan membayar 12,26 juta yen atau setara dengan US\$ 111.000 pada tahun 2014. Denda tersebut dijatuhkan kepada kelompok Zaitokukai untuk mengganti kerugian terhadap aksi kebencian yang mereka lakukan dengan menargetkan sekolah etnis Korea di Kyoto karena kerusakan beberapa fasilitas sekolah yang dialami (The Economist, 2014).

Rekomendasi dari Komite PBB pada akhirnya membuka jalan diberlakukannya undang-undang pembatasan aksi kebencian untuk pertama kalinya di Jepang. Kemudian, pada bulan Mei 2016, pemerintah Jepang telah secara resmi menetapkan undang-undang mengenai larangan kebencian yang disebut dengan the Hate Speech Act (Osaki, 2016). Undang-undang ini membuka babak baru dalam upaya pemerintah Jepang yang telah lama tertunda untuk mengendalikan laju rasisme dan diskriminasi yang semakin memanas.

Menurut laporan the National Police Agency Japan, pasca ditetapkannya hukum mengenai anti hate-speech pada tahun 2016, sejak saat itu angka protes xenofobia terlihat menurun dalam kurun waktu 11 bulan setelah ditetapkannya perundang-undangan, meskipun serangan kebencian verbal masih terus ada (Kyodo, 2017). Namun, aksi kebencian terhadap etnis Korea selalu kembali muncul ketika isu negatif yang berhubungan tentang Korea terjadi. Retorika anti Korea di Jepang tetap masih merajalela di Jepang, terutama setelah eskalasi perang dagang antara Jepang dengan Korea Selatan. Beberapa grup ekstremis bahkan juga kembali membangkitkan sentimen anti Korea. Memang, sejak era kolonial, diskriminasi rasial terhadap etnis Korea tidak dapat dihindarkan. (Ji-Won, 2019).

Sebenarnya, tidak ada upaya yang benar-benar efektif dari pemerintah Jepang untuk menekan angka penyebaran xenofobia pada masyarakat Jepang. Karena salah satu alasan terjadinya peningkatan gerakan xenofobia terhadap etnis Korea di Jepang adalah karena kegagalan pemerintah Jepang mengambil langkah-langkah efektif untuk mencegah diskriminasi rasial terhadap penduduk Korea di Jepang. Hingga saat ini, sentimen tersebut masih belum menunjukkan tanda-tanda menghilang, terutama di kalangan esktremis sayap kanan. Apapun bentuk penyebabnya, sentimen anti Korea yang marak di Jepang hanya membuat hubungan diplomatik antara Jepang dan Korea Selatan semakin memburuk. Jika tidak mendapatkan tekanan dari Internasional mengenai keprihatinan akan meningkatnya aksi kebencian di Jepang, undang-undang anti diskriminasi bisa saja tidak akan pernah terjadi.



BAB III

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PENINGKATAN

XENOFOBIA DI JEPANG

Pada pembahasan ini, peneliti menjelaskan tentang alasan utama atau faktor-faktor penting mengapa peningkatan sentimen xenofobia di Jepang terjadi melalui perspektif Integrated Threat Theory atau Intergroup Threat Theory (ITT). ITT merupakan sebuah teori yang menggabungkan antara psikologi dan sosiologi sebagai dasar ilmu yang mampu menjelaskan sikap anti-imigran yang terjadi pada sebuah negara dan merupakan salah satu kerangka teori paling efisien untuk mengidentifikasi pemicu terjadinya prasangka. Pada bab sebelumnya telah dijelaskan berbagai macam aksi xenofobia yang terjadi di Jepang yang sebagian besar merupakan hate speech. Sebagai negara yang menjunjung tinggi identitas nasionalnya, sebagian besar masyarakat Jepang melakukan tindakan penolakan akan hadirnya etnis Korea. Namun, penyebab dari aksi kebencian tersebut belum dijelaskan secara mendalam sehingga pada bagian ini akan dijelaskan tentang faktor-faktor meningkatnya fenomena xenofobia di Jepang.

Integrated Threat Theory (ITT) berfokus pada kondisi yang mendorong perubahan kontak antar kelompok dan juga berfokus pada kondisi yang mengarah pada persepsi ancaman, yang berdampak pada sikap dan perilaku yang ditujukan terhadap kelompok lainnya. Menjaga keutuhan sebuah kelompok cenderung dilakukan oleh mereka yang merasa memiliki status yang tinggi dan kekuatannya terancam akan kehadiran kelompok lain. Terdapat dua jenis ancaman yang dapat diidentifikasi, yaitu ancaman realistik dan ancaman simbolik (Stephan, Diaz-Loving, & Duran, 2000). Sudah banyak studi yang menunjukkan bahwa jika suatu

kelompok merasa terancam, mereka akan melakukan segala usaha untuk melindungi keutuhan kelompoknya.

Dasar hadirnya pemikiran dari konsep Integrated Threat Theory sudah terlihat dari beberapa aksi xenofobia yang ada di Jepang. Ada dua kelompok yang menjadi fokus dari fenomena xenofobia di Jepang, kedua kelompok ini disebut dengan In group dan Out group. In group ditujukan kepada masyarakat Jepang yang memiliki sentimen xenofobia, baik individu maupun kelompok yang tergabung dalam grup anti imigran, seperti kelompok-kelompok esktremis sayap kanan. Sedangkan Out group berarti orang asing yang tinggal di Jepang, baik minoritas maupun imigran yang tinggal di Jepang. Out group dalam tulisan ini ditujukan kepada etnis Korea yang tinggal di Jepang.

Sebagai negara yang menjunjung tinggi identitas nasional mereka, sebagian besar in group melakukan tindakan penolakan akan hadirnya out group. Mereka memiliki persepsi apabila masyarakat asing sebagai out group hanya akan mengancam kehidupan in group. Jepang hanya menjunjung nilai budaya asli Jepang saja yang diterapkan tanpa budaya lain masuk dan mengganggu nilai dan budaya yang telah mereka terapkan (Tai, 2003, p. 16). In group tidak ingin munculnya orang asing dapat mengatur kehidupan mereka.

Jika ada dua kelompok yang berbeda saling berinteraksi, merupakan hal wajar ketika muncul prasangka dari satu kelompok terhadap kelompok yang lain, baik prasangka baik maupun negatif. Namun, in group cenderung memiliki prasangka negatif terhadap out group (Goh, 2019). Out group sering kali menerima berbagai macam tuduhan tertentu, namun tuduhan yang in group tujukan tidak ada bukti yang nyata dan hanya berupa persepsi saja.

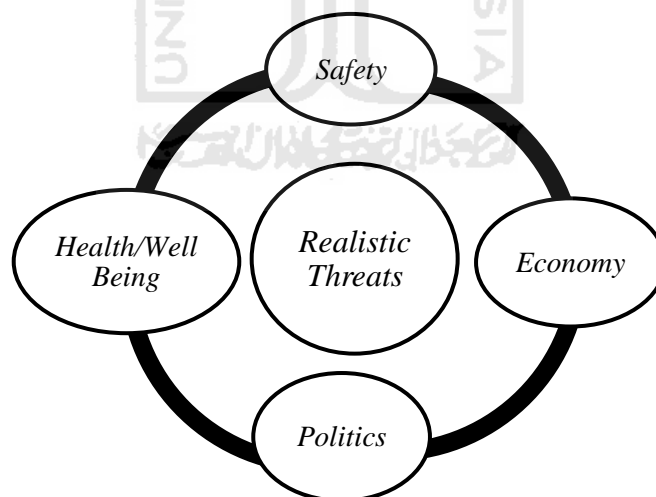
Persaingan menyebabkan terjadinya berbagai macam aksi kebencian verbal seperti hate speech hingga adanya berbagai macam diskriminasi yang ditujukan kepada out group yang telah ditulis pada bab sebelumnya. Berbagai macam bentuk aksi xenofobia dirasakan oleh etnis Korea sebagai out group di lingkungan sekolah, kerja maupun publik. Sentimen publik terhadap out group adalah yang paling negatif di pedesaan Jepang, di mana penuaan populasi dan depopulasi paling parah, dan kebutuhan imigrasi adalah yang terbesar (Peng, 2016).

Dalam konteks teori Integrated Threat Theory, ancaman antar kelompok terjadi ketika anggota satu kelompok merasakan bahwa kelompok lain berada dalam posisi yang dapat membahayakan mereka. Tulisan ini merujuk kepada kekhawatiran tentang ancaman ekonomi yang dapat membebani kesejahteraan masyarakat, disebut sebagai ancaman realistik, dan kekhawatiran tentang ancaman budaya akan menghancurkan tradisi yang ada disebut dengan ancaman simbolik.

3.1 Ancaman Realistik

Ancaman realistik merupakan ancaman yang terjadi karena timbulnya rasa ketidaksukaan masyarakat Jepang terhadap hadirnya orang asing yang bukan bagian dari warga negara. Rasa ketidaksukaan tersebut muncul karena adanya perasaan terancam. Perasaan ini dirasakan oleh masyarakat asli karena mereka merasa orang asing dapat memberikan kerugian kepada masyarakat asli secara nyata (Walter, Diaz-Loving, & Duran, 2000, p. 241). Selain rasa ketidaksukaan, ancaman ini juga terbentuk karena adanya rasa cemburu terhadap orang asing. Bentuk rasa ketidaksukaan tersebut merupakan salah satu penyebab munculnya kelompok ekstremis sayap kanan di Jepang.

Bobo mengatakan bahwa ancaman realistik merupakan alasan mendasar munculnya sebuah prasangka, “The idea that realistic threats can cause prejudice is a fundamental premise of realistic group conflict theories” (Lawrence, 1988, p. 85). Mereka hanya berusaha melindungi apa yang seharusnya menjadi milik mereka. Sedangkan menurut pendapat yang dikemukakan oleh Kendall, ancaman realistik adalah merupakan ancaman yang dihasilkan dari adanya persepsi. Ancaman ini berakibat pada aspek keselamatan, ekonomi, politik serta keberlangsungan hidup masyarakat asli apabila adanya kehadiran orang asing “poses a risk to their safety, economy, politics, health or well-being” (Kendall, 1998, p. 83). Ancaman realistik mempresentasikan ketakutan yang dirasakan kelompok ketika kelompok keberadaan kelompok lain dapat mengancam kekuatan politik, ekonomi serta kesejahteraan dimana in group berada. Berikut merupakan penjabaran mengenai tipe ancaman realistik yang dijabarkan oleh Kendall:



Gambar 1: Bentuk ancaman realistik oleh Kendall (Kendall, 1998, p. 84).

Masyarakat asli menilai bahwa hadirnya orang asing hanya akan membuat kedua kelompok bersaing untuk merebutkan sumber daya yang mereka miliki.

Padahal, sumber daya Jepang cukup dan tidak mengalami kekurangan. Pemikiran seperti itu hanya berasal dari asumsi masyarakat Jepang saja. Pemikiran tersebut muncul karena salah satu bentuk dari ancaman simbolik lain adalah pekerja asing di Jepang menjadi ancaman bagi masyarakat Jepang. Semakin bertambahnya tahun, pekerja asing yang bekerja di Jepang juga meningkat secara stabil (Reynolds, 2018). Menerima pekerja asing di Jepang juga ada poin plus dan minus. Positifnya adalah dengan menerima pekerja asing, sektor pekerjaan yang mengalami kekosongan dapat terisi. Sedangkan poin negatifnya adalah tingkat pengangguran di Jepang bisa jadi juga meningkat. Jepang menjadi negara yang multikultural dan budaya tradisional perlahan dapat menghilang.

Selain itu, muncul berbagai rumor mengenai etnis Korea yang tidak perlu membayar pajak dan air karena mereka bukan bagian dari warga negara Jepang dan masyarakat Jepang harus menanggung kesejahteraan orang Korea di Jepang. Hal ini tertulis dalam Zaitokukai's four pillar poin pertama (Ito K. , 2013, p. 436). Namun, itu semua hanya asumsi masyarakat saja. Masyarakat Jepang tidak ingin menanggung kesejahteraan orang asing di Jepang, bagi mereka hal tersebut merepotkan dan tidak dibenarkan. Masyarakat hanya menginginkan agar etnis Korea sebagai masyarakat asing bertanggung jawab atas kesejahteraan mereka sendiri karena kesejahteraan negara terbebani oleh kehadiran masyarakat asing. Sudah seharusnya pemerintah Jepang lebih fokus pada kesejahteraan masyarakat asli dibandingkan dengan orang asing.

Yoriyuki Harada, seseorang yang bertanggung jawab atas program kesejahteraan di Kementerian Kesehatan, Perburuhan dan Kesejahteraan, etnis Korea merupakan orang asing yang menerima fasilitas kesejahteraan terbesar di

antara warga negara asing yang tinggal di Jepang karena penduduk Korea yang mendominasi orang asing di Jepang. Meskipun begitu, sebenarnya tidak hanya orang Korea saja yang menerima tunjangan kesejahteraan, tetapi warga asing lain seperti orang China, Filipina dan Brazil juga menerima fasilitas kesejahteraan. Jumlah orang asing di Jepang yang menerima fasilitas kesejahteraan sosial, seperti asuransi kesehatan rumah sakit tumbuh secara signifikan selama satu dekade terakhir. (Osumi, 2018).

Persepsi negatif masyarakat asli pada ancaman realistik timbul karena adanya rasa ketidakrelaan akan privilege yang didapatkan oleh etnis Korea karena mereka berpikir bahwa fasilitas-fasilitas tersebut seharusnya hanya bisa dinikmati oleh masyarakat Jepang saja. Mereka menyadari bahwa pemerintah Jepang mulai bergerak untuk mengamankan hak-hak minoritas. Masyarakat Jepang menganggap hal tersebut merupakan sebuah persaingan yang terjadi antar dua kelompok (Shibuichi, 2015, p. 724). Maka dari itu, masyarakat asli memiliki persepsi bahwa lebih mudah bagi etnis Korea untuk dan menerima tunjangan kesejahteraan daripada bagi warga Jepang, sehingga menyebabkan masalah serius di seluruh sistem kesejahteraan di Jepang hingga warga Jepang merasa mengalami kerugian.

Selain kesejahteraan, ancaman ekonomi menjadi alasan penting mengapa masyarakat Jepang memiliki ketakutan akan kehilangan kesempatan pekerjaan (fear of losing job). Masyarakat menganggap bahwa kesempatan kerja yang seharusnya mereka miliki bisa saja diambil oleh orang asing. Asumsi seperti ini muncul dari kalangan menengah ke bawah. Masyarakat Jepang memiliki asumsi bahwa imigran yang bersedia untuk mengisi posisi pekerjaan dengan kemampuan yang mumpuni, namun bersedia bekerja dengan upah yang rendah mampu

menggeser kesempatan kerja pekerja asli Jepang dengan standar upah yang ada (Nukaga, 2006, pp. 191-192).

Jika orang asing tidak mempunyai pekerjaan, maka orang asing dianggap hanya akan memanfaatkan sistem kesejahteraan di Jepang. Apabila orang asing mempunyai pekerjaan maka masyarakat menganggap bahwa orang asing telah mengambil kesempatan kerja yang semestinya dimiliki oleh masyarakat asli Jepang. Lebih mudahnya, akan dijabarkan sebagai berikut:



Gambar 2: Sikap masyarakat asli terhadap pekerja asing (Berton, 2013, p. 31)

Fear of losing job sungguh berkontribusi besar pada fenomena xenofobia di Jepang. Orang asing dianggap sebagai sebuah ancaman bagi perekonomian negara. Masyarakat asli menganggap bahwa orang asing akan merenggut hak mereka, karena sebagian besar imigran berpindah dari satu tempat ke tempat lain memiliki tujuan ekonomi agar memiliki kehidupan yang lebih layak (Jozuka, 2018). Mengingat Jepang mengalami penyusutan ekonomi beberapa tahun belakangan,

masyarakat seakan menyalahkan kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai penerimaan pekerja asing di Jepang (Soble, 2014).

Salah satu bentuk dari ancaman realistik lain adalah pekerja asing di Jepang menjadi ancaman bagi masyarakat Jepang. Semakin bertambahnya tahun, pekerja asing yang bekerja di Jepang juga meningkat secara stabil (Reynolds, 2018). Menerima pekerja asing di Jepang juga ada poin plus dan minus. Positifnya adalah dengan menerima pekerja asing, sektor pekerjaan yang mengalami kekosongan dapat terisi. Sedangkan poin negatifnya adalah tingkat pengangguran di Jepang bisa jadi juga meningkat. Jepang menjadi negara yang multikultural dan budaya tradisional perlahan dapat menghilang.

Pemerintah Jepang berusaha menerapkan kebijakan yang menarik dengan membuka imigrasinya untuk menerima high-skilled workers untuk mengatasi isu demografinya, yaitu fenomena aging population (Gelin, 2020). Namun, kebijakan tersebut menuai pro dan kontra. Masyarakat Jepang merasa bahwa pemerintah mulai memperhatikan orang asing dibandingkan mereka yang merupakan masyarakat asli. Pada akhirnya, mereka menilai bahwa pemerintah tidak adil dalam membentuk kebijakan. Banyak diantara masyarakat Jepang yang tidak mentoleransi kebijakan pemerintah dalam menerima tenaga kerja asing yang masuk karena kekhawatiran mereka dengan nilai negara Jepang yang menjunjung tinggi identitas nasionalnya yang sewaktu-waktu dapat memecah solidaritas masyarakat Jepang. Hanya ketika penduduk asli Jepang bersedia menerima orang asing, kelompok penduduk asing dapat berintegrasi ke dalam masyarakat Jepang. Kemudian pemerintah Jepang dapat lebih memperjuangkan stabilitas sosial dan pembangunan ekonomi (Zhang, 2018, p. 208).

Jajak pendapat publik Jepang secara konsisten menunjukkan bahwa setidaknya setengah dari populasi menentang peningkatan kehadiran orang asing di negara mereka. Maka dari itu, imigrasi di Jepang tidak semudah kelihatannya, karena imajinasi kolektif Jepang merupakan negara yang konservatif sekaligus masyarakat yang homogen secara ras, etnis dan budaya sangat sulit untuk menerima kehadiran orang asing.

Sebagai bukti, mayoritas dari anggota yang bergabung dalam Zaitokukai adalah laki-laki muda Jepang yang mencari ‘kambing hitam’ dari rasa frustrasi pribadinya. Kebanyakan dari mereka merupakan pengangguran (employed) atau part timer yang tidak memiliki pekerjaan tetap (underemployed) yang hanya bisa menyalahkan orang asing, khususnya etnis Korea yang mereka anggap telah mengambil kesempatan pekerjaan yang seharusnya mereka miliki (Mackinnon, 2010). Mereka yang mengidentifikasi dirinya sebagai lower class status mulai memperhatikan kesejahteraan sosial lebih serius. Akibatnya, terjadi dugaan penyalahgunaan kesejahteraan yang dilakukan oleh pihak minoritas asing di Jepang, yang menjadi topik hangat di media massa belakangan ini (Shibuichi, 2015, p. 721).

Sebenarnya persaingan pekerjaan antara masyarakat asli dengan masyarakat asing hanya merupakan asumsi dari masyarakat Jepang saja. Menurut analisis sensus yang dilakukan oleh pemerintah Jepang, persentase tingkat pengangguran etnis Korea di Jepang cukup tinggi, sekitar dua kali lipat dari rata-rata nasional masyarakat Jepang. Sejauh ini, orang-orang Korea di Jepang cenderung bekerja pada posisi yang kurang stabil daripada masyarakat asli. Beberapa dari orang Korea ada yang bekerja sebagai pekerja kontrak maupun paruh waktu. (LAZAK, 2017, p.

3). Bahkan sejak akhir abad ke-20, etnis Korea juga mendapat diskriminasi secara sistematis. Etnis Korea mendapatkan upah yang lebih rendah dibandingkan dengan pekerja Jepang, dan banyak menerima tindakan rasisme dari orang-orang Jepang (Zhang, 2018, p. 207).

Kenyataan lain yang terjadi adalah pekerja Korea sering kali terjadi perilaku diskriminasi rasial di tempat kerja. Sebagian besar orang Korea tidak mendapatkan peluang promosi jabatan yang lebih tinggi hanya karena mereka bukan orang Jepang. Sebagai contoh kasus, seorang perawat dari etnis Korea yang memiliki status sebagai special permanent resident bekerja di rumah sakit yang dikelola oleh Pemerintah Metropolitan Tokyo ditolak dari posisi manajerial karena ia bukan bagian dari kewarganegaraan Jepang. Selain itu, etnis Korea yang bukan kewarganegaraan Jepang atau tidak melakukan naturalisasi tidak dapat mengambil posisi kepemimpinan atau posisi kepala sekolah di sekolah-sekolah umum Jepang (Cho, 2016, p. 7). Alasan tersebut menandakan bahwa berbagai macam perusahaan Jepang juga memiliki prasangka negatif terhadap orang-orang non-Jepang.

Ketakutan lain yang dimiliki oleh masyarakat Jepang pada hal lainnya, yaitu aspek politik turut menjadi sorotan. Masyarakat Jepang memiliki rasa takut apabila hak politik yang seharusnya milik mereka yang bisa saja direnggut, yaitu masyarakat yang bukan asli Jepang akan menempati kursi-kursi pemerintahan. Saat ini, hanya ada satu politisi keturunan Korea yang secara terbuka menggunakan nama Koreanya, yaitu Shin-Kun Hak (Lee S.-I. , 2012, p. 12). Penduduk Jepang semakin tahun semakin beranekaragam etnis karena pemerintah Jepang yang mulai menerima kehadiran pekerja asing di Jepang. Bukan tidak mungkin hal ini menjadi salah satu ketakutan masyarakat Jepang apabila politisi dengan latar belakang non-

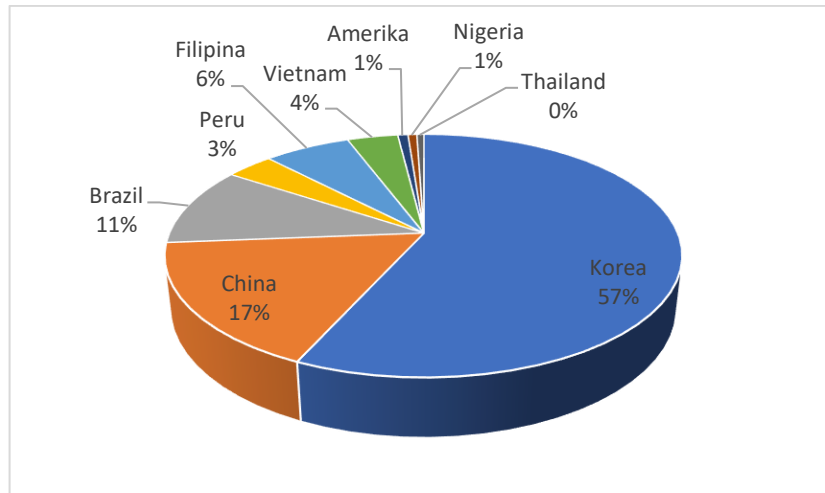
Jepang akan bertambah banyak dan menguasai kursi pemerintahan suatu saat nanti (Osaki, 2019).

Alasan mengapa masyarakat bukan Jepang tidak memiliki hak untuk melakukan pemilihan karena menurut pandangan masyarakat asli, masyarakat asing bukan merupakan bagian dari Jepang, sehingga tidak memahami dengan pasti latar belakang secara historis dan nilai-nilai tradisional yang dianut Jepang secara mendalam. Masyarakat Jepang menganggap etnis Korea adalah masyarakat asing yang bukan merupakan bagian dari Jepang, sehingga etnis Korea tidak seharusnya menikmati hak yang sama dengan apa yang didapatkan oleh masyarakat Jepang. Masyarakat asli tidak ingin masyarakat non Jepang dapat memberikan pengaruh bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang mungkin saja tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh Jepang (Takao, 2003, p. 530). Jepang merasa lebih aman karena tidak ada ketakutan bahwa masyarakat asing mengambil alih negara.

Namun, persepsi tersebut tidaklah benar. Sebaliknya, etnis Korea tidak berhak untuk melakukan pemilihan suara, karena dalam hukum yang dianut Jepang, hak untuk memilih hanya bisa dilakukan oleh kewarganegaraan asli Jepang saja (LAZAK, 2017, p. 5). Masyarakat Jepang pada dasarnya memang tidak menginginkan orang asing menduduki kursi pemerintahan. Namun, sebenarnya etnis Korea justru mendapatkan diskriminasi, karena mereka merasa telah membayar pajak sebagai permanent resident di Jepang. Mereka hanya ingin mendapatkan hak untuk voting pada pemilihan umum di Jepang sebagai timbal baliknya, namun hukum di Jepang tidak mengizinkan orang asing untuk melakukan pemilihan umum (Aoki, 2016).

Ketakutan masyarakat asli lainnya adalah dengan meningkatnya jumlah orang asing di negaranya, Jepang akan menjadi negara yang berbahaya karena tidak aman. Rasa tidak aman menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat Jepang tidak menyukai kehadiran orang asing di negaranya. Menurut mereka, tidak semua imigran yang masuk ke Jepang memiliki niat baik. Kekhawatiran tersebut memunculkan persepsi negatif masyarakat Jepang karena perasaan tidak aman apabila pemerintah lebih banyak menerima lebih banyak orang asing, mereka cenderung memiliki kemungkinan melakukan tindakan kriminal lebih tinggi, lagi-lagi karena tuntutan ekonomi. Persepsi-persepsi masyarakat Jepang ini berdasar pada kegagalan negara-negara Barat dalam menangani masalah imigran yang justru menimbulkan peningkatan kriminalitas di negaranya (Paillard-Borg & Homgren, 2016, p. 5). Selain itu, etnis Korea memiliki keistimewaan, yaitu memiliki nama alias (nama Jepang), masyarakat asli takut hal tersebut akan disalahgunakan, apabila etnis Korea melakukan tindakan kriminal, hanya nama aliasnya saja yang digunakan, sedangkan identitas aslinya akan disembunyikan (Ito K. , 2013, p. 436).

Ketua kelompok Zaitokukai, Sakurai mengungkapkan bahwa banyak orang Jepang yang harus kehilangan nyawa karena tuduhan tindakan kriminal yang dilakukan oleh orang Korea (Krieger, 2015). Terlebih lagi, tingkat kriminalitas yang dilakukan oleh masyarakat asing memang lebih banyak dari kejahatan yang oleh orang Jepang sendiri.



Data masyarakat asing di Jepang yang melakukan tindakan kriminal (2005-2014) (Bandou, 2016)

Data ini terungkap setelah peneliti meminta anggota parlemen Jepang, Takashi Nagao yang merupakan Dewan Perwakilan Partai Demokrat Liberal untuk meminta penyerahan data ke Badan Kepolisian Nasional. Menurut survei angka kriminal di Jepang yang dilakukan oleh masyarakat asing, terdapat 6444 total orang yang tercatat melakukan kriminalitas. Hal yang menarik yang dapat dilihat dari grafik di atas adalah dalam data tersebut, angka kriminalitas tertinggi dipegang oleh etnis Korea, sebanyak 3437 kasus, lebih dari setengah dari total angka kriminalitas yang terjadi. (Bandou, 2016). Jika melihat dari survei tersebut, merupakan hal yang wajar jika muncul anggapan bahwa etnis Korea menambah tingkat resiko tindakan kriminal di Jepang. Ancaman ini tidak hanya mengancam nilai-nilai yang dijunjung Jepang, tetapi juga sebagai sebuah ancaman keamanan nasional negara. Prasangka negatif tersebut muncul karena adanya ancaman yang masyarakat asli rasakan.

3.2 Ancaman Simbolik

Ancaman dan ketakutan antar kelompok sebagai penyebab utama terjadinya prasangka juga berfokus pada ancaman simbolik. Ancaman simbolik merupakan

ancaman terhadap “way of life” (Stephan & Stephan, 1996, p. 418). Ancaman ini melibatkan nilai, kepercayaan, moral, budaya, ideologi dan sikap pada kelompok yang memiliki perbedaan persepsi, yaitu antara in group dan out group (Oskamp, 2000, p. 42). Perbedaan persepsi inilah yang dianggap sebagai kepercayaan bahwa kelompok lain berusaha melanggarnya, yang menciptakan munculnya prasangka terhadap kelompok yang terstigma, salah satunya tindakan xenofobia terhadap etnis Korea di Jepang.

Bentuk dari ancaman simbolik berbeda dengan ancaman realistik, karena ancaman ini tidak terlihat secara nyata. Ancaman simbolik menganggap bahwa orang asing memiliki nilai-nilai yang berbeda dengan yang mereka percayai. Perbedaan tersebut dianggap sebagai ancaman bagi masyarakat Jepang karena mereka bahwa mereka adalah kelompok yang paling benar, sehingga menimbulkan sifat etnosentris dalam kelompok yang menganggap bahwa mereka adalah kelompok yang lebih superior dibandingkan dengan kelompok lainnya. Superioritas yang dirasakan, ditemukan karena terjadinya minimal interaksi antar kelompok (Stephan, Ybarra, & Bachman, 1999, p. 2222).

Sejak tahun 1970-an, mitos mengenai homogenitas dan keunikan Jepang mencapai pada puncaknya (Yamashiro, 2013, p. 147). Beberapa peneliti percaya bahwa orang Jepang takut dengan kehadiran budaya asing, yang dapat menyebabkan masyarakat Jepang kehilangan “identitas Jepang” mereka. Fear of losing their own traditions memang benar-benar terjadi di Jepang (Katz, 2019). Bahkan menurut survei yang dilakukan oleh pemerintah Jepang pada tahun 2014, menunjukkan bahwa 66,4% responden mengatakan bahwa mereka tidak mempunyai ‘friendly feelings’ terhadap orang Korea. Survei ini dilakukan terhadap

3000 orang masyarakat Jepang di atas 20 tahun. Data ini merupakan data tertinggi sentimen terhadap orang Korea semenjak survei pertama kali dilakukan pada tahun 1975 (Kang, 2014). Hal ini menunjukkan jarak yang semakin jauh antara dua negara bertetangga. Ancaman simbolik menjadi sebuah ‘bibit’ terjadi sentimen xenofobia di antara masyarakat asli yang menjunjung tinggi rasa nasionalismenya.

Masyarakat Jepang melihat etnis Korea sebagai orang asing yang bukan bagian dari warga negara. Jepang memiliki 3 ideologi dasar, yaitu “Japan is anything but a monoethnic, monolingual, monocultural nation” (Burgess C. , 2007). Masyarakat Jepang memiliki citra yang secara etnis, kultural maupun bahasa merupakan masyarakat yang homogen. Sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi homogenitas, Jepang memiliki kebudayaan dan tradisi yang hanya dimiliki oleh Jepang saja. Ini merupakan sebuah ancaman terhadap identitas nasional Jepang yang memiliki nasionalisme dan kebudayaan yang unik.

Etnis Korea dikenal sebagai home country-oriented. Beberapa dari mereka menganggap diri mereka sebagai orang Korea yang tinggal di luar Korea dan memberikan prioritas utamanya untuk berkontribusi pada pembangunan Korea. Orang-orang seperti ini cenderung menjaga jarak dengan masyarakat Jepang dan hidup dalam komunitas Korea saja. Mereka mengidentifikasi dan mengembangkan rasa bangga yang kuat sebagai orang asli Korea. Mereka percaya bahwa orang Korea harus bisa berbicara bahasa Korea meskipun tidak tinggal di Korea (Yurdagul, 2014, p. 54). Walaupun tidak semua etnis Korea di Jepang memiliki pemikiran tersebut, namun beberapa pemikiran etnis Korea yang seperti ini menimbulkan masalah baru. Bagi masyarakat Jepang, etnis Korea sebagai masyarakat asing yang tinggal di Jepang harus bisa menyesuaikan diri dengan

budaya tradisional Jepang (Lukfin, 2012). Kebanggaan etnis Korea terhadap negaranya menimbulkan kecemasan yang membentuk sikap penolakan terhadap etnis Korea.

Bentuk ketakutan masyarakat Jepang terhadap kehadiran etnis lain terlihat dari beberapa cuitan yang tertulis di platform sosial media Twitter. Masyarakat Jepang menginginkan etnis Korea kembali ke negaranya hanya karena mereka 'berbeda'. Seperti cuitan dengan kata-kata yang menunjukkan ketidaksukaan masyarakat asli dari @Ohsaworks, "To be honest, the reason why Koreans in Japan is that they can simply get welfare for free. Seriously, please return to your country." Cuitan ini mendapatkan lebih dari 800 retweets, yang berarti lebih dari 800 orang Jepang menyetujui cuitan tersebut. Selain itu, dalam cuitan lain yang ditulis oleh @Tomo20309138, masyarakat Jepang merasa mereka hanya melindungi identitas negaranya, "We Japanese have every right to protect our own harmonious society." Cuitan tersebut menandakan sikap penolakan terhadap orang asing. Sikap penolakan yang ditunjukkan oleh masyarakat Jepang terhadap orang asing merupakan sebuah sikap mempertahankan dan melindungi identitas nasional mereka karena Jepang merupakan negara yang menekankan homogenitas kewarganegaraannya sebagai sebuah identitas (Yamashiro, 2013, p. 2).

Di bawah ICCPR atau Deklarasi Hak Minoritas PBB, etnis Korea di Jepang termasuk dalam definisi etnis minoritas. Namun, pemerintah Jepang tidak pernah memperlakukan penduduk Korea sebagai bangsa atau etnis minoritas. Pemerintah Jepang mengakui adanya kelompok minoritas dan tidak ada tindakan untuk melindungi dan mempromosikan identitas etnis, budaya atau bahasa etnis Korea. Sebaliknya, mereka justru menghadapi berbagai diskriminasi karena

kewarganegaraan persyaratan yang ditetapkan di hadapan hukum. Selain itu, sekolah Korea mengalami diskriminasi dibandingkan dengan sekolah internasional lainnya (LAZAK, 2017, p. 2).

Pendapat publik lebih menganggap bahwa minoritas maupun imigran sebagai ancaman bagi nasionalisme negara. Permasalahan ini kerap kali terjadi di dalam pendapatan rumah tangga, jumlah pengangguran hingga peredaran ekonomi serta lingkungan sekolah. Salah satu contohnya adalah kelompok ekstremis sayap kanan juga diketahui beberapa kali melakukan aksi kebencian di sekolah-sekolah Korea. Sekolah Korea di Jepang mengajarkan pelajarannya menggunakan bahasa Korea, kecuali dalam mata pelajaran Bahasa Jepang dan Bahasa Inggris. Karena mereka tidak disubsidi oleh Pemerintah Jepang, maka mereka bebas membuat kurikulum termasuk buku pelajaran yang digunakan di sekolah. Buku pelajaran yang mereka gunakan dibuat oleh perusahaan penerbitan yang terhubung dan dikirimkan langsung dari Korea. Hal tersebut menyebabkan masyarakat Jepang berasumsi bahwa sekolah-sekolah Korea telah menyebarkan nilai-nilai komunisme dan propaganda anti-Jepang (Matsumoto, 2005, p. 7). Hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat, mereka takut apabila nilai-nilai tradisional Jepang akan runtuh.

Siswa Korea yang bersekolah di sekolah Jepang sering kali mengalami penindasan. Diperkirakan hanya 14.2% siswa sekolah dasar dan 9% siswa sekolah menengah yang menggunakan nama Korea mereka karena stigma yang mereka terima dari masyarakat Jepang (Yamada & Yusa, 2014, p. 34). Karena nama Korea dan Jepang sangat berbeda satu sama lain, sehingga penggunaan nama Korea sangat dihindari oleh murid-murid Jepang yang takut menghadapi tindakan diskriminasi

atau bahkan bullying. Diskriminasi semacam ini masih kuat di kalangan masyarakat Jepang.

Kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh etnis Korea menjadi faktor penting bagi masyarakat asing untuk melakukan integrasi dan melakukan adaptasi terhadap budaya, karena ada tembok penghalang yang susah untuk ditembus oleh etnis Korea sebagai masyarakat asing (Mike, 2014). Masyarakat cenderung tidak terbuka mengenai perasaan mereka karena telah terlebih dulu memiliki prasangka buruk terhadap orang asing. Pada akhirnya, sebagian dari etnis Korea memilih untuk melaksanakan budaya mereka saja karena perasaan khawatir apabila tidak diterima dalam komunitas masyarakat Jepang, karena perasaan gelisah etnis Korea apabila tidak dapat bergabung dengan baik dalam komunitas Jepang .

Masuknya kebudayaan baru ditakutkan dapat mempengaruhi budaya Jepang karena ada beberapa perbedaan budaya yang dimiliki oleh Jepang dan Korea (Selatan). Kedua etnis ini merupakan masyarakat yang kolektif, tetapi Jepang memiliki budaya kolektif eksternal, sementara etnis Korea memiliki budaya yang kolektif internal. Artinya, kebudayaan Jepang terpusat pada masyarakat (society-centered), sedangkan Korea lebih terpusat pada hubungan keluarga (family-oriented) (Ito M. , 2019). Jepang sebagai society-centered, terdapat ciri-ciri budaya yang jelas unik bagi masyarakat Jepang, seperti pola pikir berorientasi pada kelompok, dan munculnya prasangka negatif terhadap orang-orang dengan pemikiran berbeda dan kecenderungan untuk mengevaluasi tindakan individu dengan benar (The Japan Times, 2008).

Di Jepang sendiri, mengikuti standar sosial dan tatanan sosial yang ada merupakan hal yang sangat penting. hubungan antar keluarga di Jepang cenderung

seperti bangsawan dengan para pelayannya. Jika ada seorang ayah yang pensiun dari posisinya sebagai kepala keluarga dan menyerahkannya kepada anak laki-lakinya, maka ia harus mematuhi apa yang ayahnya katakan. Merupakan perbedaan yang mencolok dengan etnis Korea yang mementingkan keluarga sebelum yang lainnya (Lee H. Y., 2008, p. 13). Mempertimbangkan apa yang orang lain rasakan tentang tindakan dan perilaku orang lain akan menjadi masalah yang besar bagi Jepang karena Jepang yang cenderung individualis dan society-centered.

Pasca masuk banyaknya imigran asing ke Jepang, anggapan bahwa imigran adalah pemecah komunitas bangsa dan membuat solidaritas masyarakat melemah muncul. Proses integrasi selalu membuat masyarakat asli memiliki sikap pesimistik terhadap etnis Korea (Katz, 2019). Masyarakat menganggap jika mereka tidak turut berjuang dalam upaya integrasi sebagai masyarakat asli. Terutama mereka yang masih membawa budaya negara lamanya ke Jepang.

Ketakutan lainnya adalah Bahasa, hal ini menjadi sebuah ketakutan bagi integrasi para minoritas. Tidak semua imigran Korea dapat berbahasa Jepang dengan lancar mengakibatkan masyarakat asli sulit berkomunikasi dengan mereka dan cenderung tidak mau melakukan kontak. Sejauh ini, Jepang hanya berbahasa Jepang saja. Untuk berbicara Bahasa Inggris saja, masyarakat Jepang cukup kesulitan. Sehingga ketakutan masyarakat Jepang untuk melakukan komunikasi dengan orang asing cukup besar. Secara keseluruhan, bahasa Jepang menikmati status sebagai satu-satunya bahasa di negara tersebut. Melalui survei yang dilakukan oleh The Nikken Asian Review, 52% orang asing merasa kesulitan bekerja di Jepang karena perbedaan Bahasa, 22% permasalahan visa dan 18% menulisa karena ketidakpercayaan akan karir yang akan diambil (Obe & Funatsu,

2018). Masyarakat melihat bahwa mereka tidak berjuang keras dalam melakukan integrasi sebagai masyarakat asing di Jepang, terutama etnis Korea yang masih membawa budaya negara lamanya, karena beberapa dari mereka tetap berkomunikasi menggunakan Bahasa Korea dengan sesama.

Di masa lalu, banyak kelas budaya tentang Jepang yang mengatakan bahwa untuk benar-benar diterima, seseorang harus memiliki darah Jepang, berbahasa Jepang dan berasal dari Jepang. Jika dilihat secara kasat mata, etnis Korea tidak mampu memuaskan ketiganya, karena masyarakat Jepang menilai orang lain dengan faktor-faktor tersebut secara tidak sadar. Renho Murata, pemimpin populer partai demokrat Jepang bahkan juga menerima bentuk diskriminasi hanya karena dia bukan seorang berdarah asli Jepang (Brasor, 2016).

Sikap tidak ramah terhadap heterogenitas serta sikap nasionalisme yang dimiliki oleh masyarakat Jepang sendiri tertulis dalam sebuah konsep yang dinamakan Nihonjinron. Sebuah ideologi yang berupaya menghargai homogenitas dengan membingkai identitas Jepang dengan karakteristik khas yang membentuk sifat khas Jepang (Japaneseness) (Sugimoto, 1999, p. 81). Nihonjinron sendiri secara harfiah berarti sebuah teori yang mengangkat aspek kultural atau budaya Jepang, merupakan konsep yang menekankan pada nilai identitas nasional dan kultur masyarakat Jepang tentang apa yang membedakan Jepang dengan negara-negara lain dan juga menekankan pada keunikan yang dimiliki oleh Jepang, “pure blood” yang berhubungan dengan ras, budaya, bahasa serta agama (Liddicoat, 2001, p. 34).

Ciri khas yang membentuk sifat khas Jepang ini mendefinisikan identitas asli Jepang (Morita, 2017, p. 4). Meskipun para peneliti tidak menyetujui mengenai

definisi Nihonjinron dan pengaruhnya, namun konsep ini telah menjadi ‘barang’ yang sangat populer, telah disebarluaskan, diwujudkan, diinternalisasi oleh masyarakat Jepang sehingga telah berkontribusi penciptaan pandangan tertentu (Burgess C. , 2007). Terdapat empat kategori utama yang termasuk dalam prinsip-prinsip dasar yang dibahas dalam Nihonjinron, yaitu:

1. Homogenitas: Masyarakat asli Jepang merupakan orang-orang yang unik dan homogen
2. Darah: bagi orang-orang Jepang, ‘darah’ merupakan poin utama dalam komunikasi, saling pengertian akan budaya dan penampilan sebagai masyarakat asli
3. Kompetensi budaya: Masyarakat Jepang menganggap bahwa orang asing tidak memiliki kemampuan untuk sepenuhnya memahami budaya Jepang, bahkan menguasai bahasanya
4. Partisipasi sosial: Sosial budaya Jepang sudah seharusnya dipertahankan dan orang asing harus tidak diperhitungkan dalam berbagai bidang, seperti pernikahan, pekerjaan, bidang mengajar, partisipasi politik serta artistik (Kazufumi & Befu, 2017, p. 94).

Prinsip-prinsip yang tertulis tersebut mendorong masyarakat cenderung menolak kehadiran orang asing, dan masyarakat Jepang menginginkan pemerintah Jepang untuk membatasi imigrasi karena ingin tetap menjadi masyarakat yang homogen serta menjaga nilai-nilai kultural yang telah dianut Jepang.

Berikut sedikit penjelasan mengenai ringkasan teori terhadap pembahasan pada skripsi ini:

Tabel 1: Ringkasan deskripsi ancaman realistik dan ancaman simbolik

Ancaman	Deskripsi
Ancaman realistik	<p>Ekonomi:</p> <p>Etnis Korea mendapatkan privilege dari pemerintah Jepang yang seharusnya hanya didapatkan masyarakat Jepang saja. Sedangkan etnis lain tidak mendapatkan privilege dari pemerintah Jepang.</p> <p>Masyarakat Jepang takut apabila etnis Korea mengambil kesempatan pekerjaan yang seharusnya masyarakat Jepang miliki.</p> <p>Kesejahteraan:</p> <p>Adanya anggapan bahwa orang asing hanya menjadi beban bagi kesejahteraan negara karena tidak perlu membayar pajak namun dapat menikmati berbagai fasilitas di Jepang.</p> <p>Politik:</p> <p>Ketakutan masyarakat Jepang apabila etnis Korea menempati kursi pemerintahan akan menggeser hak masyarakat Jepang.</p> <p>Keamanan:</p> <p>Tingkat Kriminalitas tinggi apabila menerima lebih banyak orang asing.</p>

<p>Ancaman Simbolik</p>	<p>Nilai:</p> <p>Homogenitas Jepang sebagai sebuah negara menjadi identitas masyarakat sehingga cenderung menolak kehadiran etnis selain etnis asli Jepang karena memiliki sikap nasionalisme yang tinggi</p> <p>Budaya:</p> <p>Kebudayaan yang berbeda yang tidak cocok di Jepang sehingga muncul adanya kekhawatiran masyarakat asing apabila tidak diterima dalam komunitas, sehingga masyarakat asing cenderung mempraktekkan budayanya sendiri</p> <p>Moral:</p> <p>Terjadi perpecahan solidaritas diantara masyarakat Jepang</p> <p>Sikap: Masyarakat asli cenderung dan menunjukkan sikap penolakan terhadap etnis Korea</p>
--------------------------------	---

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Sentimen xenofobia terhadap etnis Korea di Jepang erat kaitannya dengan sejarah dan budaya. Pemikiran xenofobia sudah berkembang sejak lama di Jepang, diawali dengan tindakan diskriminasi terhadap etnis Korea ketika masa pendudukan Jepang terhadap Semenanjung Korea yang terjadi setelah tahun 1910. Sentimen xenofobia memiliki dampak yang kurang baik terhadap orang asing yang tinggal di Jepang. Berakar dari xenofobia, kemudian muncul berbagai grup ekstremis sayap kanan merajalela, dan yang terbesar dinamakan Zaitokukai yang beranggotakan masyarakat asli Jepang yang memiliki sentimen xenofobia.

Awal mula Zaitokukai didirikan memiliki tujuan untuk menghilangkan hak istimewa yang diterima oleh etnis Korea. Mereka beranggapan bahwa orang-orang Korea yang memiliki status tersebut dapat menikmati akses ke sistem kesejahteraan sosial, pensiun, serta asuransi kesehatan Jepang. Namun, masyarakat Korea tidak memiliki hak untuk memilih dalam bidang politik, serta ada beberapa pasal mengenai pensiun dan kesejahteraan sosial yang tidak berlaku pada masyarakat Korea.

Bentuk dari aksi kebencian yang menjadi sorotan di Jepang adalah hate speech. Peningkatan xenofobia di Jepang mengalami kenaikan yang cukup signifikan antara tahun 2012 hingga tahun 2015, dengan angka tertinggi terjadi pada tahun 2014 dengan 378 kasus yang terjadi, sebelum diberlakukannya anti-hate speech law. Jumlah dari aksi kebencian yang terjadi di Jepang hanya estimasi dan

kemungkinan besar bisa beberapa kali lipat lebih besar dari jumlah yang telah dilaporkan.

Sikap xenofobia memiliki dampak buruk terhadap etnis Korea di Jepang. Aksi kebencian yang dilakukan oleh grup sayap kanan menggunakan taktik serangan yang dilakukan oleh grup sayap kanan memang tidak melukai secara fisik, namun menyebabkan gangguan secara psikologis dimana hadirnya kelompok tersebut menimbulkan ancaman bagi masyarakat. Sikap xenofobia memiliki dampak buruk secara psikologis bagi etnis Korea. Persepsi masyarakat Jepang yang turut menyerang juga selalu berhubungan dengan kemungkinan tindakan kriminal yang dilakukan oleh masyarakat asing. Ketakutan ini berhubungan dengan kegagalan negara-negara barat dalam menangani imigran.

Aksi kebencian verbal yang dilakukan oleh kelompok sayap kanan terjadi karena terdapat argumen-argumen yang menjadi pemicu utama mereka melakukan hate speech. Argumen-Argumen tersebut disebut juga sebagai Zaitokukai's "four pillars yaitu Special Permanent Resident (Tokubetsu Eijuu Shikaku), Korean School Subsidiation (Chosen Gakkou Hojoku Koufuu), Welfare Benefit Preferential Treatment (Seikatu Hogo Yuuguu) dan Alias Dispensation (Tsuumei Seido).

Kemudian, Anti hate-speech law diresmikan dua tahun setelah pemerintah Jepang mendapat tekanan dari PBB pada tahun 2014. Upaya pemerintah dalam menanggulangi aksi kebencian di Jepang cenderung terlambat, karena peningkatan sudah terjadi sejak tahun 2012. Salah satu alasan peningkatan gerakan xenofobia terhadap etnis Korea di Jepang adalah karena kegagalan pemerintah Jepang mengambil langkah-langkah efektif untuk mencegah diskriminasi rasial terhadap penduduk Korea.

Berdasarkan analisis penulis melalui perspektif Integrated Threat Theory yang dicetuskan oleh Walter G. Stephan dan Cookie White Stephan, terdapat dua ancaman penyebab munculnya prasangka negatif terhadap orang asing. Kedua variabel tersebut adalah ancaman realistik dan ancaman simbolik.

Ancaman realistik, terjadi karena timbulnya rasa ketidaksukaan masyarakat Jepang terhadap hadirnya etnis Korea yang bukan bagian dari warga negara. Rasa ketidaksukaan tersebut muncul karena adanya perasaan terancam pada masyarakat asli karena mereka merasa orang asing hanya akan memberikan kerugian kepada mereka. Ancaman ini berakibat pada aspek keselamatan, ekonomi, politik serta keberlangsungan hidup masyarakat asli apabila adanya kehadiran orang asing. Rasa takut masyarakat asli terbentuk terhadap kompetisi dalam aspek ekonomi terlihat bagaimana mereka merasa tersaingi untuk mendapat pekerjaan. Pertama, salah satu kekhawatiran masyarakat Jepang adalah mereka takut akan kehilangan kesempatan kerja. Mereka menganggap bahwa kesempatan kerja yang seharusnya mereka miliki bisa saja diambil oleh orang asing. Masyarakat Jepang merasa bahwa orang asing yang menetap di Jepang mendapatkan keistimewaan menjadi sebuah ancaman.

Sedangkan ancaman simbolik, merupakan ancaman terhadap pandangan atau tata kehidupan suatu kelompok. Ancaman simbolik menjadi salah satu sumber timbul adanya prasangka karena merasa pandangan kelompoknya adalah paling benar, sehingga mereka merasa khawatir apabila nilai-nilai yang dianut oleh suatu kelompok dipengaruhi oleh pandangan atau nilai-nilai dari kelompok lain. Pendapat bahwa pandangan grupnya adalah yang paling benar juga terkait dengan identitas

diri suatu kelompok. Ancaman ini berfokus pada perbedaan antar grup mengenai nilai, kepercayaan, moral dan sikap antar kelompok.

Selain itu, karena masyarakat Jepang menjunjung tinggi rasa nasionalisme, hal tersebut membuat masyarakat Jepang tidak ingin out group datang karena perbedaan identitas dan kultur yang membuat hal tersebut kemudian dikatakan akan mengancam identitas masyarakat Jepang sebagai negara homogen yang sudah menjadi identitas Jepang sejak dahulu. Jadi, aksi-aksi tersebut merupakan pemicu terbentuknya konflik antara masyarakat Jepang dengan out group. Ancaman yang dirasakan masyarakat Jepang terhadap etnis Korea memiliki konsekuensi nyata, terlepas dari persepsi ancaman tersebut akurat atau tidak, yaitu berupa ancaman yang dirasakan daripada yang sebenarnya.

4.2 Saran dan Rekomendasi

Jika dilihat dari tingginya angka xenofobia di Jepang, penelitian selanjutnya akan terlihat lebih menarik apabila berfokus pada penelitian xenofobia pasca terjadinya pandemi COVID-19 pada awal tahun 2020. Setelah terjadinya pandemi, muncul berbagai sentimen terhadap orang-orang China di Jepang. Pemerintah Jepang juga diharapkan mampu mengambil tindakan preventif agar tidak mengulangi kesalahan yang lalu ketika hate speech terhadap etnis Korea merajalela. Mengingat sikap xenofobia terhadap orang asing bukan merupakan hal yang baru di Jepang, hal ini akan menarik untuk dibahas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahn, R. (2012). Korean students' minority schooling experience in Japan. *Intercultural Education*.
- Akashi, J. (2014). New aspects of Japan's immigration policies: is population decline opening the doors? *Contemporary Japan*, 178.
- Alix, I. P. (2016). 1 The Influences of Japanese State-Society Xenophobia on Reparations for the Republic of Korea. 8.
- Aoki, M. (2016, July 2). On the campaign trail for the foreign right to vote. Retrieved from The Japan Times: <https://www.japantimes.co.jp/news/2016/07/02/national/politics-diplomacy/campaign-trail-foreign-right-vote/>
- Arudou, D. (2006, June 27). Righting a wrong United Nations representative's trip to Japan has caused a stir. Retrieved from Japan Times: https://www.japantimes.co.jp/community/2006/06/27/issues/righting-a-wrong/#.XIRUb1MzY_U
- Asahina, Y. (2019). *Becoming right-wing citizens in contemporary Japan*. Taylor & Francis, 2.
- Baird, C. (2018, September 19). What does Japan's Nationality Act really mean for its dual citizens? Retrieved from The Japan Times: <https://www.japantimes.co.jp/community/2018/09/19/how-tos/japans-nationality-act-really-mean-dual-citizens/>
- Banas, J. D. (2018). *The Socio-Cultural Implications of the Aging Population in Japan*. 2.
- Bandou, T. (2016, December 18). 在日外国人犯罪検挙状況」資料 ダウンロード専用ページ. Retrieved from Bandou Japan: <http://bandou.an-an.org/index.php?%E3%80%8C%E5%9C%A8%E6%97%A5%E5%A4%96%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E7%8A%AF%E7%BD%AA%E6%A4%9C%E6%8C%99%E7%8A%B6%E6%B3%81%E3%80%8D%E8%B3%87%E6%96%99%E3%80%80%E3%83%80%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89%E5%B0%82%E7%94%A8%E3%8>
- Berton, R. M. (2013). Lazy or Greedy? Impact of Xenophobic Beliefs on Natives' Attitudes towards Redistribution . *Scientific Research*, 31.
- Boyd, J. (2015, March 19). Hate speech in Japan: To ban or not to ban? Retrieved from Aljazeera: <https://www.aljazeera.com/indepth/features/2015/03/hate-speech-japan-ban-ban-150310102402970.html>
- Brasor, P. (2016, September 17). Renho and the 'pure blood' mythos. Retrieved from Japan Times: <https://www.japantimes.co.jp/news/2016/09/17/national/media-national/renho-pure-blood-mythos/>
- Brown, A. (2017). What is so special about online (as compared to offline) hate speech? *Ethnicities*, 2.
- Brubaker, R. (1992). *Citizenship and Nationhood in France and Germany*. SAGE, 11-25.

- Burgess, C. (2007, March 1). Multicultural Japan? Discourse and the 'Myth' of Homogeneity. Retrieved from The Asia-Pacific Journal: <https://apjif.org/-Chris-Burgess/2389/article.html>
- Burgess, J. (1986, September 28). Japanese Proud of Their Homogeneous Society. Retrieved from The Washington Post: <https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1986/09/28/japanese-proud-of-their-homogeneous-society/629281b9-3357-4169-80ba-eb5d031f1c31/>
- Chapman, D. (2008). *Zainichi Korean Identity and Ethnicity*. London: Routledge.
- Cho, Y.-M. (2016). *Koreans in Japan: a struggle for acceptance*. Chicago Unbound.
- Committee on the Elimination of Racial Discrimination. (2014). International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination CERD/C/JPN/CO/7-9 Distr.: General 26 September 2014 Original: English. United Nations.
- Deutsche Welle. (2013, July 9). Japan conservatives: 'Hate speech goes too far'. Retrieved from <https://www.dw.com/en/japan-conservatives-hate-speech-goes-too-far/a-16938717>
- Fukurai, H., & Yang, A. (2018). The History of Japanese Racism, Japanese American Redress, and the Dangers Associated with Government Regulation of Hate Speech. *Hastings Constitutional Law Quarterly*, 534.
- Gelin, M. (2020, June 23). Japan Radically Increased Immigration—and No One Protested. Retrieved from Foreign Policy: <https://foreignpolicy.com/2020/06/23/japan-immigration-policy-xenophobia-migration/>
- George, C. (2014). *Hate Speech Law and Policy*. Wiley Online Library, 1.
- Goh, D.-S. (2019, September 16). Anti-Korean sentiment thriving in Japan. Retrieved from Asia Times: <https://asiatimes.com/2019/09/anti-korean-sentiment-is-thriving-in-japan/>
- Gulo, W. (2002). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grasindo.
- Hawon, J. (2019, January 19). The Special Permanent Residents in Japan: Zainichi Korean. Retrieved from The Yale Review of International Studies: <http://yris.yira.org/comments/2873>
- Hervik, P. (2015). Xenophobia and Nativism. *Aalborg*, 796-806.
- Higashikawa, K. (2017). Japan's Hate Speech Laws: Translations of the Osaka City Ordinance and the National Act to Curb Hate Speech in Japan. *Asian-Pacific Law & Policy*, 2.
- Hiroshi, T., Makoto, O., Kyongnam, P., Wetherall, W., & Katsuchi, H. (2006, March 29). The Diene Report on Discrimination and Racism in Japan. Retrieved from The Asian-Pacific Journal: <https://apjif.org/-Tanaka-Hiroshi/1882/article.html>
- Ishibashi, K. (2017, January 14). State Practice of Asian Countries in International Law. Japan: *Asian Yearbook of International Law*. Retrieved from The Korea Times: http://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2018/07/113_195438.html
- Itagaki, R. (2015). *The Anatomy of Korea-Phobia in Japan*. Japanese Studies.
- Ito, K. (2014). *Anti-Korean Sentiment and Hate Speech in the Current Japan: A Report from the Street*. Procedia Environmental Sciences.

- Ito, M. (2013, March 21). Pro-Pyongyang schools barred from tuition waiver. Retrieved from Japan Times: <https://www.japantimes.co.jp/news/2013/02/21/national/pro-pyongyang-schools-barred-from-tuition-waiver/#.XlSB4VMzqaD>
- Ito, M. (2019, May 30). 10 Major Cultural Differences Between Japan And Korea. Retrieved from Asian Minato: <https://asianminato.com/10-major-cultural-differences-between-japan-and-korea#:~:text=Both%20countries%20have%20collective%20society,social%20order%20is%20very%20important.>
- Japan Today. (2015, February 24). Abe criticizes hate speech. Retrieved from <https://japantoday.com/category/politics/abe-criticizes-hate-speech>
- Japan Today. (2014, June 12). Highly skilled foreigners to be allowed to stay permanently in Japan. Retrieved from <https://japantoday.com/category/national/highly-skilled-foreigners-to-be-allowed-to-stay-permanently-in-japan>
- Ji-Won, P. (2019, March 24). Hate speech against Koreans still active in JapanPosted : 2019-03-24 17:48Updated : 2019-03-25 21:59 . Retrieved from The Korea Times: https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2019/03/120_265876.html
- Relations, 33.
- Jozuka, E. (2018, December 8). Japan needs immigrants, but do immigrants need Japan? Retrieved from CNN World: <https://edition.cnn.com/2018/12/06/asia/japan-immigration-bill-foreign-workers/index.html>
- Kang, T.-J. (2014, December 30). Japan's Growing Anti-Korea Sentiment. Retrieved from The Diplomat: <https://thediplomat.com/2014/12/japans-growing-anti-korea-sentiment/>
- Katz, M. (2019, September 23). What Happens When Japan Stops Looking 'Japanese'? Retrieved from The Atlantic: <https://www.theatlantic.com/international/archive/2019/12/immigration-japan-national-identity/603568/>
- Kazufumi, M., & Befu, H. (2017). Japanese Cultural Identity. Japan: Taylor & Francis.
- Kendall, R. (1998). Anxiety, fear contribute to prejudice, say NMSU professors. NM State.
- Kenji, S. (2012, August 24). Defusing Japan's Demographic Time Bomb. Retrieved from Nippon: <https://www.nippon.com/en/in-depth/a01001/>
- Kikuchi, D. (2017, June 4). Tackling signs in Japan that you're not welcome. Retrieved from The Japan Times: Tackling signs in Japan that you're not welcome
- Kim, D. H., & Sundstrom, R. (2014). Xenophobia and Racism. *PhilPapers*, 25-31.
- Kitayama, Y. (2018). The rise of the far right in Japan, and challenges posed for education. *London Review of Education*.
- Koizumi, M. (2019, March 31). Foreign workers are on the way, but are Japanese businesses ready? Retrieved from Japan Times: <https://www.japantimes.co.jp/news/2019/03/31/national/foreign-workers-way-japanese-businesses-ready/#.XQ9jzpMzbfY>

- Krieger, D. (2015, November 30). Japan combats rise in hate speech. Retrieved from America Aljazeera: <http://america.aljazeera.com/articles/2015/11/30/japan-encounters-rise-in-hate-speech.html>
- Kumpis, A. (2015). Representations of Zainichi Koreans in Japanese Media: The Case of The Japan Times 2000–2014 . *International Journal of Area Studies* , 46.
- Kyodo. (2017, May 22). A year after enactment of hate speech law, xenophobic rallies down by nearly half. Retrieved from The Japan Times: <https://www.japantimes.co.jp/news/2017/05/22/national/social-issues/year-enactment-hate-speech-law-xenophobic-rallies-nearly-half/#:~:text=National%20%2F%20Social%20Issues-,A%20year%20after%20enactment%20of%20hate%20speech%20law,rallies%20down%20by%20near>
- Kyodo. (2016, June 5). Anti-Korean hate speech rally called off in Kawasaki amid protests. Retrieved from The Japan Times: <https://www.japantimes.co.jp/news/2016/06/05/national/anti-korean-hate-speech-rally-called-off-kawasaki-amid-protests/#.Xzjne5MzZp9>
- Kyodo. (2015, May 20). Video posting site shuts down anti-Korean Zaitokukai activists' channel. Retrieved from Japan Times: <https://www.japantimes.co.jp/news/2015/05/20/national/social-issues/video-posting-site-shuts-anti-korean-zaitokukai-activists-channel/#.XIRsBIMzZ0s>
- LAZAK. (2017). *Discrimination Against Koreans in Japan: Japan's Violation of its International Human Rights Obligation*. Osaka.
- LAZAK. (2014). *Discrimination Against Koreans in Japan: Japan's Violation of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*. Lawyers Association of Zainichi Koreans, 33.
- LAZAK. (2014). *Report on the issue of Racism and Hate Speech in Japan*. Tokyo: Mindan Tokyo.
- Lawrence, B. (1988). *Group Conflict, Prejudice, and the Paradox of Contemporary Racial Attitudes*. New York: Plenum.
- Lee, H. Y. (2008). *A Comparative Study of Korean, Chinese, and Japanese Traditional Family and Contemporary Business Organizations*. East Asia Institute, 13.
- Lee, S. I. (2012). *Diversity of Zainichi Koreans and Their Ties to Japan and Korea*. Afrasian Research Centre.
- Liddicoat, A. J. (2001). Internationalising Japan: Nihonjinron and the Intercultural in Japanese Language-in-education Policy. *Journal of Multicultural Discourses*, 34.
- Lie, J. (2008). *Zainichi (Koreans in Japan)*. Berkeley: University of California Press.
- Lukfin, B. (2012, December 10). The quickly ageing nation faces huge gaps in the workforce. Now, it's taking historic steps to lower barriers for foreigners in a place that's long been resistant to immigration. Retrieved from BBC: <https://www.bbc.com/worklife/article/20181210-more-seniors-more-foreigners-how-japan-is-rapidly-changing>

- Mainichi. (2017, March 31). 30% of foreigners living in Japan claim discrimination: gov't survey. Retrieved from Mainichi Japan: <https://mainichi.jp/english/articles/20170331/p2a/00m/0na/016000c>
- Mainichi. (2016, March 31). Hundreds of hate speech rallies held across Japan annually: Justice Ministry report. Retrieved from Mainichi Japan: <https://mainichi.jp/english/articles/20160331/p2a/00m/0na/003000c>
- Mainichi Japan. (2017, June 8). Editorial: To end hate speech, Japan must face its deep-rooted discriminatory thinking. Retrieved from <https://mainichi.jp/english/articles/20170608/p2a/00m/0na/019000c>
- Mackinnon, M. (2010, October 5). A black sun rises in a declining Japan. Retrieved from The Globe and Mail: <https://www.theglobeandmail.com/news/world/a-black-sun-rises-in-a-declining-japan/article1215080/>
- Mainichi. (2017, March 31). 30% of foreigners living in Japan claim discrimination: gov't survey. Retrieved from Mainichi Japan: <https://mainichi.jp/english/articles/20170331/p2a/00m/0na/016000c>
- Mainichi. (2016, March 31). Hundreds of hate speech rallies held across Japan annually: Justice Ministry report. Retrieved from Mainichi Japan: <https://mainichi.jp/english/articles/20160331/p2a/00m/0na/003000c>
- Mainichi Japan. (2017, June 8). Editorial: To end hate speech, Japan must face its deep-rooted discriminatory thinking. Retrieved from <https://mainichi.jp/english/articles/20170608/p2a/00m/0na/019000c>
- Makashvili, A., Vardanashvili, I., & Javakhishvili, N. (2018). Testing Intergroup Threat Theory: Realistic and Symbolic Threats, Religiosity and Gender as Predictors of Prejudice. *Europe's Journal of Psychology*.
- Martel, X. R., & Laurent, C. (2019). From colonization to Zaitokukai: the legacy of racialoppression in the lives of Koreans in Japan. *Asian Ethnicity*, 10.
- Matsumoto, M. (2005). Education Policy for Korean minority in Japan. *Welfare Asia*, 7.
- McCurry, J. (2013, July 12). Using hate speech in Japan has even some on far right saying 'enough'. Retrieved from The Christian Science Monitor: <https://www.csmonitor.com/World/Asia-Pacific/2013/0712/Rising-hate-speech-in-Japan-has-even-some-on-far-right-saying-enough>
- Mike. (2014, March 14). 5 reasons foreigners find it hard to become friends with Japanese people. Retrieved from Japan Today: <https://japantoday.com/category/features/lifestyle/5-reasons-foreigners-find-it-hard-to-become-friends-with-japanese-people>
- Mogekwu, M. (2005). African Union: Xenophobia as poor intercultural communication. *African Journalism Studies*, 7.
- Moleong, D. L. (1989). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Morita, L. (2015). Some Manifestations of Japanese Exclusionism. *SAGE Open*, 3.
- Morita, L. (2017). Why Japan isn't more attractive to highly-skilled migrants. *Cogent Social Sciences*.
- Morooka, H. (2016). Ethnic and National Identity of Third Generation Koreans in Japan. *CUNY Academic Works*, 4.

- Nukaga, M. (2006). *Xenophobia and the Effects of Education Determinants of Japanese Attitudes toward Acceptance of Foreigners*. JGSS Research Series.
- Obe, M., & Funatsu, Y. (2018, June 29). Language is main barrier to foreigners wanting to work in Japan. Retrieved from Nikkei Asian Review: <https://asia.nikkei.com/Economy/Language-is-main-barrier-to-foreigners-wanting-to-work-in-Japan>
- Ohi, A. (2018, December 20). Two Kinds of Conservatives in Japanese Politics and Prime Minister Shinzo Abe's Tactics to Cope with Them. Retrieved from Asia Pacific Bulletin: <https://www.eastwestcenter.org/system/tdf/private/apb449.pdf?file=1&type=node&id=36932>
- Osaki, T. (2016, May 24). Members of the anti-Korean group Zaitokukai hold a rally in the city of Osaka in March 2013. | KYODO BY TOMOHIRO OSAKI STAFF WRITER MAY 24, 2016ARTICLE HISTORYPRINTSHARE Japan's first anti-hate speech law passed the Diet on Tuesday, marking a step forward. Retrieved from The Japan Times: https://www.japantimes.co.jp/news/2016/05/24/national/social-issues/diet-passes-japans-first-law-curb-hate-speech/#.XyJpTi1h3_Q
- Osaki, T. (2019, April 26). Foreign-born candidates discuss challenges and prejudice on the Tokyo campaign trail. Retrieved from The Japan Times: <https://www.japantimes.co.jp/news/2019/04/26/national/politics-diplomacy/tokyo-election-trail-foreign-born-candidates-discuss-challenges-prejudice/>
- Oskamp, S. (2000). *Reducing prejudice and discrimination*. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
- Osumi, M. (2017, July 2). 'No foreign tenants' — and not much you can do about it. Retrieved from The Japan Times: <https://www.japantimes.co.jp/community/2017/07/02/issues/no-foreign-tenants-not-much-can-you-can-do/>
- Osumi, M. (2018, May 7). More of Japan's non-Japanese are living on welfare. Retrieved from The Japan Times: <https://www.japantimes.co.jp/news/2018/05/07/national/japans-non-japanese-living-welfare/#.XyuVuC1h1p9>
- Paillard-Borg, S., & Homgren, J. (2016). *Immigration, Women, and Japan—A Leap Ahead and a Step Behind: A Qualitative Journalistic Approach*. SAGE Open, 5.
- Park, S. (2017). *Inventing aliens: immigration control, 'xenophobia' and racism in Japan*. Kobe: Race & Class.
- Peng, I. (2016, June 7). Japan and its immigration policies are growing old. Retrieved from East Asia Forum: <https://www.eastasiaforum.org/2016/06/07/japan-and-its-immigration-policies-are-growing-old/>
- Penney, M. (2012, December 31). *Anti-Racism Protestors Confront the Zaitokukai*. Retrieved from Japan Focus: <https://apjif.org/-Matthew-Penney/4758/article.html>
- Pollmann, M. (2015, July 24). *Japan's Xenophobia Problem*. Retrieved from The Diplomat: <https://thediplomat.com/2015/07/japans-xenophobia-problem/>

- Presse, A. F. (2013, October 7). Capital News. Retrieved from Anti-Korean 'Hate Speech' In Japan Ruled Illegal: <https://www.capitalfm.co.ke/news/2013/10/anti-korean-hate-speech-in-japan-ruled-illegal/>
- Real Estate Japan. (2017, May 18). Retrieved from <https://resources.realestate.co.jp/living/housing-discrimination-against-foreigners-in-japan-ministry-of-justice-survey/>: Housing Discrimination
- Renfro, W. G., & Lausanne, C. (2002). *The Role of Threat in Intergroup Relations*. New York: Psychology Press.
- Reynolds, I. (2018, October 18). Abe wants foreigners to bolster Japan's shrinking workforce but finds vocal resistance. Retrieved from The Japan Times: <https://www.japantimes.co.jp/news/2018/10/18/national/social-issues/japan-first-led-protesters-slam-abe-plan-allow-foreign-workers/>
- Richards, C. (2014, September 1). New Anti-Hate Speech Laws Could Be Double-Edged Sword. Retrieved from The Diplomat: <https://thediplomat.com/2014/09/new-anti-hate-speech-laws-could-be-double-edged-sword/>
- Sanchez-Mazas, M., & Licata, L. (2015). Xenophobia: Social Psychological Aspects. *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*, 802.
- Sato, D. (2013, August 4). Rallies dent business in Koreatown. Retrieved from Japan Times: <https://www.japantimes.co.jp/news/2013/08/04/national/social-issues/rallies-dent-business-in-koreatown/>
- Shibuichi, D. (2015). *Zaitokukai and the Problem with Hate Groups in Japan*. Japan: Asian Survey.
- Si-Soo, P. (2014, February 13). Anti-hallyu Voices Growing in Japan. Retrieved from The Korea Times: http://koreatimes.co.kr/www/news/culture/2014/02/135_152045.html
- Soble, J. (2014, November 16). Defying Expectations, Japan's Economy Falls Into Recession. Retrieved from The New York Times: <https://www.nytimes.com/2014/11/17/business/international/defying-expectations-japans-economy-shrinks-further.html>
- Spice Digest. (2010). *Koreans in Japan*. Spice Standford.
- Stephan, W. G., & Stephan, C. W. (1996). Predicting Prejudice. *International Journal of Intercultural Relations*.
- Stephan, W. G., & Stephan, C. W. (1996). *Predicting Prejudice*. Mexico: Elsevier.
- Stephan, W. G., Diaz-Loving, R., & Duran, A. (2000). Integrated Threat Theory and Intercultural Attitudes. *Journal of Cross-Cultural Psychology*.
- Stephan, W. G., Ybarra, O., & Bachman, G. (1999). Prejudice Toward Immigrants. *Journal of Applied Social Psychology*.
- Sugimoto, Y. (1999). *Making Sense of Nihonjinron*. Thesis Eleven. Liddicoat, A. J. (2001). Internationalising Japan: Nihonjinron and the Intercultural in Japanese Language-in-education Policy. *Journal of Multicultural Discourses*, 34.
- Suryana. (2010). *Metodologi Penelitian*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Tai, E. (2003). *Rethinking Culture, National Culture, and Japanese Culture*. Japan: Association of Teachers of Japanese.

- Takao, Y. (2003). *Foreigners' Rights in Japan: Beneficiaries to Participants*. California: University of California Press.
- Tanaka, K. (2017, December 15). Twitter Japan is Not a Safe Space for Minority Users. Retrieved from Global Voices Advox: <https://advox.globalvoices.org/2017/12/15/twitter-japan-is-not-a-safe-space-for-minority-users/>
- The Economist. (2014, September 27). A Troubling Rise in Xenophobic Vitriol. Retrieved from <https://www.economist.com/asia/2014/09/27/spin-and-substance>
- The Economist. (2014, September 27). Retrieved from Hate speech in Japan Spin and substance: <https://www.economist.com/asia/2014/09/27/spin-and-substance>
- The Japan Times. (2008, March 2). Fear of foreigners holds Japan back. Retrieved from <https://www.japantimes.co.jp/opinion/2008/03/02/reader-mail/fear-of-foreigners-holds-japan-back/#.XzpqKSW7qaM>
- The Japan Times. (2014, August 8). Switch to 'special' permanent resident status for Koreans proceeding slowly. Retrieved from <https://www.japantimes.co.jp/news/2014/08/08/national/crime-legal/switch-special-permanent-resident-status-koreans-proceeding-slowly/>
- Tsuya, N. (2012). *The Impacts of Population Decline in Japan: Demographic Prospects and Policy Implications*. Suntory Foundation, 5.
- UNHCR. (2006, March 2006). The Diene Report on Discrimination and Racism in Japan. Retrieved from The Asia-Pacific Journal: <https://apjif.org/-Tanaka-Hiroshi/1882/article.html>
- United Nations Commission on Human Rights. (2006). United Nations, 2.
- United Nations. (2006, January 24). Retrieved from Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and All Forms of Discrimination: <https://www.refworld.org/pdfid/4411820e0.pdf>
- Visocnik, N. (2016). *The Role of Religion in the Life of Zainichi Koreans in Japan*. Ljubljana: Asian Studies.
- Yamada, A., & Yusa, T. (2014). *Ethnic Microaggressions: The Experiences of Zainichi Korean Students in Japan*. UCLA.
- Yamaguchi, T. (2013). *Xenophobia in Action: Ultrationalism, Hate Speech, and the Internet in Japan*. Duke University Press.
- Yamashiro, J. H. (2013). *The Social Construction of Race and Minorities in Japan*. Japan: Sociology Compass.
- Yurdagul, E. (2014). *The Disputes Between South Korea and Japan: The Zainichi Koreans and Korean Popular Culture Phenomenon's Impacts on the Zainichi Korean*. Humanities and Social Sciences Review.
- Zhang, J. (2015). Specific Xenophobia? Japanese Acceptance Attitudes toward Chinese Immigrants -- Journal of the Graduate School of Asia-Pacific Studies. Asia-Pacific Studies, 212.